

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Provinsi Sulawesi Tengah
2022



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Provinsi Sulawesi Tengah
2022



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI TENGAH 2022

ISSN : 2715-6907
No Publikasi : 72000.2228
Katalog : 4102004.72
Ukuran Buku : 17,6 cm × 25 cm
Jumlah Halaman : xiv + 83 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Dicetak oleh:

UD. RIO

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah : Drs. Simon Sapary, M.Sc.

Penanggung Jawab dan Penyunting : Rukhedi, S.Si., MSE.

Pengolah Data dan Penulis Naskah : Ananto Yanuar, SST., M.P.W.P.
Rifka, SST.
Fitra Aulia, SST.
Yudha Subakti, S.Si.
Afifah Fakhrunnisaa, S.Tr.Stat.
Maya Novita Sari, S.Tr.Stat.
Riska Fitriani, S.Tr.Stat.

<https://sulteng.ac.id>

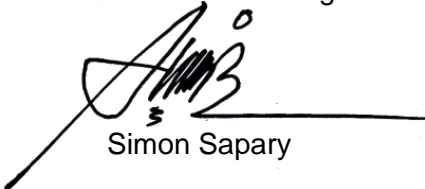
KATA PENGANTAR

Program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat karena masyarakat merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian program pembangunan dalam bidang kesejahteraan rakyat, maka BPS Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penyedia data, menerbitkan publikasi berjudul Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2022.

Publikasi ini merupakan salah satu produk tahunan BPS Provinsi Sulawesi Tengah yang menyajikan data kondisi kesejahteraan rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah. Data yang digunakan dalam publikasi ini sebagian besar bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, disampaikan terima kasih.

Palu, November 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah



Simon Sapary



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	xiii
BAB 1 KARAKTERISTIK PENDUDUK	1
Perkembangan Penduduk	3
Komposisi Penduduk dan Tantangan Menghadapi Bonus Demografi	4
Usia Wanita Kawin Pertama dan KB sebagai Kontrol Angka Kelahiran	6
BAB 2 CAPAIAN TINGKAT PENDIDIKAN	11
Perkembangan Capaian Pendidikan	14
Kemampuan Membaca dan Menulis Perempuan Lebih Rendah Dibandingkan dengan Laki-Laki	18
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	20
BAB 3 TANTANGAN KESEHATAN	23
Morbiditas sebagai Gambaran Resistensi Masyarakat	25
Pola Hidup Merokok	27
Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	29
BAB 4 KONDISI KETENAGAKERJAAN	35
Angkatan Kerja sebagai Modal Pembangunan	37
Lapangan Usaha Pertanian Mendominasi Penyerapan Tenaga Kerja	42
Potret Ketenagakerjaan Menurut Pendidikan	43
BAB 5 POLA KONSUMSI DAN KETIMPANGAN RUMAH TANGGA	47
Pola Konsumsi Kembali Bergeser	49
Tingkat Kecukupan Gizi	52
Ketimpangan Rumah Tangga	54
BAB 6 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	57
Kepemilikan dan Kualitas Rumah Tinggal	60
Fasilitas Rumah Tinggal	64
BAB 7 POTRET KEMISKINAN	69
Perkembangan Penduduk Miskin	71



	Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Perdesaan Lebih Tinggi	74
BAB 8	INDIKATOR SOSIAL LAINNYA	77
	Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Menjadi Kebutuhan Primer	79
	Tindak Kejahatan Masih Perlu Diawasi	82
	Kredit Usaha Menggerakkan Ekonomi Masyarakat	83

<https://sulteng.bps.go.id>



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Sulawesi Tengah, 2020 – 2021 (ribu jiwa)	4
Gambar 1.2.	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Sulawesi Tengah, 2021	7
Gambar 1.3.	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di Sulawesi Tengah, 2021	8
Gambar 2.1.	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Sulawesi Tengah, 2017-2021 (Tahun)	15
Gambar 2.2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Sulawesi Tengah, 2021	17
Gambar 2.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) di Sulawesi Tengah, 2021	18
Gambar 2.4.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Latin di Sulawesi Tengah, 2021	19
Gambar 2.5.	Rasio Murid terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Sulawesi Tengah, 2021/2022	22
Gambar 3.1.	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Satu Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Tengah, 2021	26
Gambar 3.2.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Sebulan Terakhir Merokok Tembakau Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Tengah, 2021	27
Gambar 3.3.	Rata-Rata Jumlah Batang Rokok Per Minggu yang Dihisap Perokok di Sulawesi Tengah, 2021	28
Gambar 3.4.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke atas yang Merokok Menurut Jumlah Batang Rokok Rata-Rata Per Minggu yang Dihisap di Sulawesi Tengah, 2021	29
Gambar 3.5.	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021	31
Gambar 3.6.	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Jalan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021	33



Gambar 3.7.	Persentase Penduduk yang Menjalani Rawat Inap Menurut Tempat Rawat Inap di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021	33
Gambar 4.1.	Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Tengah, Agustus 2021	39
Gambar 4.2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sulawesi Tengah, 2017 – 2021 (Agustus)	40
Gambar 4.3.	Pengangguran Menurut Jenis Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Tengah, Agustus 2021 (ribu jiwa)	41
Gambar 4.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah, 2017 – 2021 (Agustus)	41
Gambar 4.5.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan di Sulawesi Tengah, Agustus 2021 (ribu jiwa)	43
Gambar 4.6.	Perkembangan TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2020 – 2021	44
Gambar 5.1.	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Sulawesi Tengah, 2020 – 2021	51
Gambar 5.2.	Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan di Sulawesi Tengah, 2021	52
Gambar 5.3.	Rata-Rata Konsumsi Kalori (kkal) per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Tengah, 2021	53
Gambar 5.4.	Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Tengah, 2021	54
Gambar 5.5.	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sulawesi Tengah, 2017 – 2021	55
Gambar 6.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah di Sulawesi Tengah, 2021	61
Gambar 6.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah Per Kapita di Sulawesi Tengah, 2021	62
Gambar 6.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Rumah di Sulawesi Tengah, 2021	63
Gambar 6.4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Rumah di Sulawesi Tengah, 2021	63
Gambar 6.5.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Sulawesi Tengah, 2021	64
Gambar 6.6.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Sulawesi Tengah, 2021	66
Gambar 6.7.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan di Sulawesi Tengah, 2021	67



Gambar 7.1.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah, 2016 – 2021	72
Gambar 8.1.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Beberapa Akses Terhadap TIK di Sulawesi Tengah, 2021	81
Gambar 8.2.	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021	82
Gambar 8.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Penerimaan Kredit Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021	83

<https://sulteng.bps.go.id>



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah dan Rasio Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Tengah, 2021	5
Tabel 1.2.	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan di Sulawesi Tengah, 2021	5
Tabel 1.3.	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang Melaksanakan KB Menurut Jenis Alat Kontrasepsi di Sulawesi Tengah, 2021	9
Tabel 2.1.	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021/2022	20
Tabel 3.1.	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021	30
Tabel 3.2.	Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021	30
Tabel 4.1.	Jumlah Angkatan Kerja di Sulawesi Tengah, 2017 – 2021 (Agustus) (ribu orang)	38
Tabel 4.2.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Sulawesi Tengah, Agustus 2021	42
Tabel 4.3.	TPAK dan TPT di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, Agustus 2021	45
Tabel 5.1.	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per kapita Sebulan di Sulawesi Tengah, 2021	50
Tabel 5.2.	Klasifikasi Ketimpangan Indeks Gini	54
Tabel 6.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Sumber Air Minum di Sulawesi Tengah, 2021	65
Tabel 7.1.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Tengah, 2016 – 2021	73
Tabel 7.2.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Tengah, 2016 – 2021	74



Karakteristik Penduduk

<http://sing.bps.go.id>



KARAKTERISTIK PENDUDUK

Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini adalah penduduk, memegang peranan penting dalam proses pembangunan suatu wilayah. Selain sebagai pelaku dalam pembangunan, penduduk juga sebagai tujuan akhir dari suatu pembangunan. Oleh sebab itu, penataan dan pengembangan yang berkaitan erat dengan penduduk harus direncanakan dengan matang.

Dalam proses perencanaan pembangunan, data dan informasi kependudukan menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan. Perkembangan penduduk perlu dicermati, baik dari sisi jumlah maupun karakteristik penduduk, seperti komposisi dan distribusinya. Data yang dapat dimanfaatkan tidak hanya kondisi saat ini, akan tetapi kondisi masa lampau dan proyeksi masa yang akan datang. Data tersebut sangat diperlukan sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan. Setiap kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, sangat mempertimbangkan karakteristik masyarakat itu sendiri.

Perkembangan Penduduk

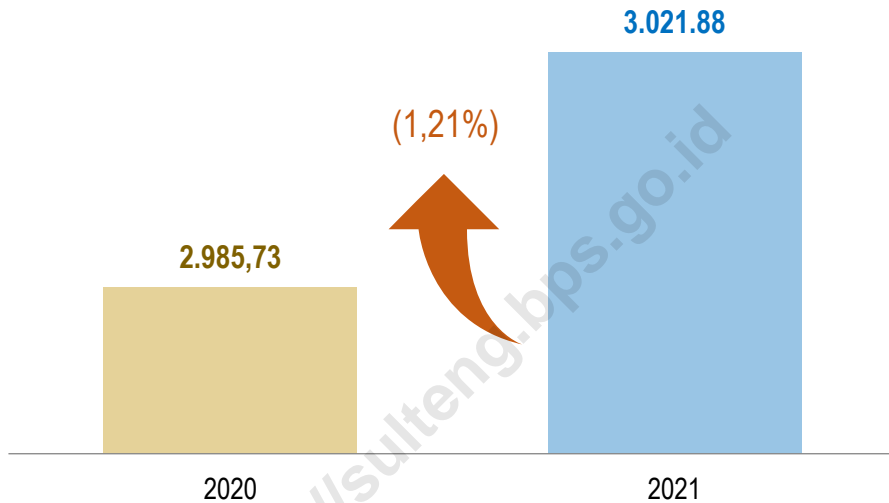
Berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 jumlah penduduk di Sulawesi Tengah pada tahun 2021 sebanyak 3.021,88 ribu jiwa. Ditinjau dari kenaikannya, jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 36,15 ribu jiwa atau sebesar 1.21 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan.

Pada tahun 2021, kepadatan penduduk di Sulawesi Tengah mencapai 48 jiwa per km². Kepadatan penduduk merupakan indikator tekanan penduduk di suatu wilayah. Ditinjau di masing-masing daerah, diketahui bahwa terjadi ketimpangan kepadatan penduduk antar kabupaten/kota. Kepadatan penduduk terpusat di daerah perkotaan yang memiliki berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga mengundang penduduk wilayah kabupaten untuk bekerja atau menetap di kota. Dalam hal ini, Kota Palu sebagai ibukota provinsi memiliki kepadatan yang paling tinggi, mencapai 945 jiwa per km², jauh



di atas angka kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara kabupaten/kota lain hanya memiliki kepadatan penduduk di bawah seratus. Kabupaten dengan kepadatan terendah yaitu Morowali Utara yaitu sebanyak 12 jiwa per km².

Gambar 1.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Sulawesi Tengah, 2020 – 2021 (ribu jiwa)



Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022

Kepadatan penduduk yang berlebihan akan dihadapkan pada masalah-masalah sosial ekonomi, seperti masalah keterbatasan lahan pemukiman, penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Kepadatan penduduk yang tinggi akan berimbas pada tingkat pengangguran yang tinggi apabila lapangan pekerjaan tidak dapat menampung angkatan kerja yang ada.

Komposisi Penduduk dan Tantangan Menghadapi Bonus Demografi

Jika dilihat komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk di Sulawesi Tengah lebih banyak penduduk laki-laki, yaitu sebanyak 1,55 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1,47 juta jiwa. Rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 105,49 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 105 – 106 penduduk laki-laki.



Tabel 1.1. Jumlah dan Rasio Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Tengah, 2021

Jumlah	3 021 789
Laki-Laki	1 551 317
Perempuan	1 470 562
Rasio (persen)	105,49

Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022

Komposisi penduduk menurut umur bermanfaat untuk mengetahui distribusi penduduk usia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan lansia (65 tahun ke atas). Pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbang oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang belum produktif dapat menjadi beban perekonomian secara makro dan menjadi beban rumah tangga secara mikro. Hal tersebut berbeda dengan pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbang oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang produktif yang biasanya berasal dari migrasi pencari kerja yang masuk.

Tabel 1.2. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan di Sulawesi Tengah, 2021

Umur	Jumlah
(1)	(2)
0-14	811 090
15-64	2 054 132
65+	156 657
Angka Beban Ketergantungan (persen)	47,11

Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai kebutuhan hidup penduduk yang belum/tidak produktif lagi. Sebaliknya, persentase angka beban ketergantungan semakin kecil menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai kebutuhan hidup penduduk yang belum/tidak produktif. Pada tahun 2021, angka beban ketergantungan Sulawesi Tengah sebesar 47,11. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif memiliki tanggungan sebanyak 47-48 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi.



Angka beban ketergantungan di bawah 50 merupakan indikasi bahwa suatu daerah berada pada periode jendela peluang (*windows of opportunity*). Kesempatan ini sebagai dampak positif adanya bonus demografi (*demographic dividend*), yaitu bonus yang dinikmati suatu wilayah sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya.

Sebuah wilayah dikatakan mengalami bonus demografi jika dua orang penduduk usia produktif (15-64) menanggung satu orang tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun atau lebih). Keuntungan bonus demografi dari sisi perekonomian tentu akan membuka peluang peningkatan perekonomian melalui peningkatan pendapatan. Sebagai ilustrasi, dalam suatu rumah tangga terdapat 2 anggota rumah tangga usia produktif (misalnya ayah dan ibu) dan satu anggota rumah tangga yang tidak produktif, anak di bawah 15 tahun misalnya. Jika terdapat kesempatan kerja yang juga cukup untuk menampung mereka, maka akan terjadi kelebihan kemampuan memenuhi kebutuhannya sehingga ada kemampuan bagi rumah tangga untuk melakukan saving (menabung) atau melakukan investasi sumber daya manusia (*human capital*) yang lebih tinggi baik bagi kedua orang tua pada ilustrasi tadi ataupun bagi anaknya. Investasi sumber daya manusia misalnya dengan menyekolahkan pada jenjang yang lebih tinggi, ataupun meningkatkan kemampuan tambahan misalnya melalui kursus dan lain-lain.

Jendela peluang ini tidak boleh disia-siakan, harus disertai dengan peningkatan kesempatan lapangan kerja. Salah satunya dengan menggenjot lapangan usaha yang belum maksimal dan memacu perkembangan UMKM untuk menyerap angkatan kerja yang berlimpah.

Usia Wanita Kawin Pertama dan KB sebagai Kontrol Angka Kelahiran

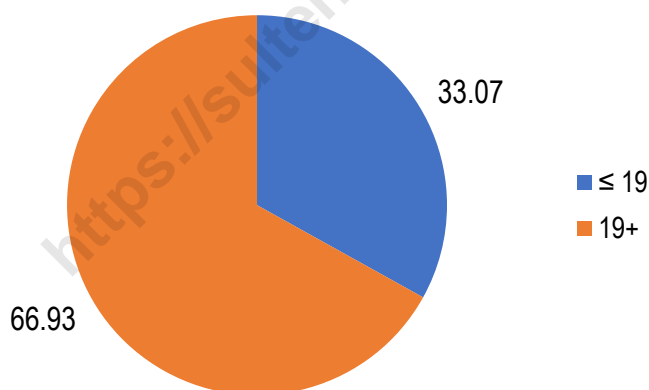
Pembahasan mengenai pertumbuhan penduduk tidak lepas dari angka kelahiran. Angka kelahiran dipengaruhi oleh masa reproduksi perempuan. Semakin panjang masa reproduksi, maka kemungkinan jumlah anak yang dilahirkan semakin banyak. Masa reproduksi perempuan dapat dihitung dari usia perkawinan pertama. Di Sulawesi



Tengah, pada tahun 2021 masih terdapat 33,07 persen penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas yang pernah kawin pada umur perkawinan pertama 19 tahun ke bawah. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 35,04 persen.

Usia perkawinan pertama seorang wanita berpengaruh terhadap risiko melahirkan. Semakin muda usia perkawinan pertama, semakin besar risiko yang dihadapi selama masa kehamilan/melahirkan, baik keselamatan ibu maupun anak, karena belum matangnya rahim wanita muda dalam proses perkembangan janin atau karena belum siap mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia perkawinan pertama yang ideal bagi seseorang adalah 21-25 tahun.

Gambar 1.2. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021

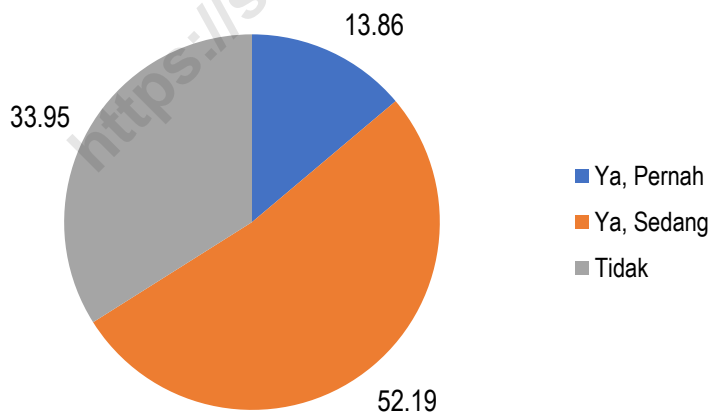
Di Sulawesi Tengah, pada tahun 2021 persentase penduduk perempuan berumur 10 ke atas yang pernah kawin dengan usia perkawinan pertama di atas 19 tahun sebesar 66,93 persen. Sementara sisanya, 33,07 persen perempuan pernah kawin dengan usia perkawinan pertama di bawah 19 tahun. Perkawinan di bawah usia 19 tahun secara kesehatan reproduksi bisa dikatakan masih muda, secara mental, sosial, dan ekonomi pada umumnya belum mapan. Semakin muda usia kawin pertama yang dilakukan seseorang, maka akan semakin lama pula masa reproduksinya. Hal ini berpengaruh pada



tingkat fertilitas wanita dan penduduk secara umumnya. Semakin lama masa reproduksi wanita, maka kemungkinan wanita tersebut melahirkan banyak anak akan semakin besar. Dalam persoalan makro, hal ini akan menyebabkan meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk suatu wilayah.

Selain pendewasaan usia kawin pertama, cara lain yang efektif dalam mengendalikan angka kelahiran yaitu melalui program KB. Program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak, dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan menggunakan berbagai macam alat kontrasepsi. Pemerintah mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat, terutama untuk partisipasi KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti *Intrauterine device* (IUD) dan Implan. Dengan cakupan KB yang semakin meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk lebih dapat dikendalikan lagi.

Gambar 1.3. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021

Pada tahun 2021, persentase penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin di Sulawesi Tengah, 52,19 persen di antaranya sedang menggunakan KB dan masih terdapat 33,95 persen yang tidak ber-KB.



Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua, yaitu sementara dan permanen. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu. Beberapa hal dapat menjadi bahan pertimbangan seseorang memilih alat KB, seperti faktor keamanan, frekuensi pemakaian, efek samping, keterjangkauan harga, kepraktisan cara penggunaan, dan faktor kenyamanan bagi penggunaannya. Di Sulawesi Tengah, alat KB yang paling banyak digunakan yaitu suntikan dan pil. Terdapat 44,97 persen penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin yang sedang ber KB menggunakan suntikan dan 29,63 persen yang menggunakan pil.

Tabel 1.3. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang Melaksanakan KB Menurut Jenis Alat Kontrasepsi di Sulawesi Tengah, 2021

Jenis Alat/Metode (1)	Persentase (2)
Sterilisasi wanita/Tubektomi/MOW	2,59
Sterilisasi pria/Vasektomi/MOP	0,53
IUD/AKDR/Spiral	6,46
Suntikan	44,97
Susuk KB/Implan	13,23
29,63	29,63
Kondom pria/Karet KB	0,14
Intravag/Kondom wanita/Diafragma	0,05
Metode menyusui alami	0,29
Pantang berkala/Kalender	1,86
Lainnya	0,27
Total	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021



Capaian Tingkat Pendidikan

<http://sireng.bps.go.id>



CAPAIAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu komponen penting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui modal sumber daya manusia. Salah satu pilar utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi suatu wilayah yaitu meningkatkan investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Pendidikan memiliki arti yang luas, baik pendidikan dalam arti formal maupun pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas modal manusia. Peningkatan pendidikan seseorang dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan yang banyak, maka semakin tinggi produktivitasnya dan berimbas pada perekonomian yang akan tumbuh lebih tinggi. Hal yang senada juga tampak pada kajian Bank Dunia yang membandingkan selama 25 tahun bahwa 20 negara yang lebih fokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia memiliki korelasi kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan tingkat pendapatan.

Pemerintah Indonesia saat ini sangat gencar melaksanakan berbagai macam program pembangunan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diharapkan dengan besarnya anggaran tersebut dapat menghasilkan anak-anak yang mampu mendapatkan proses belajar yang efektif dan unggul, sehingga bisa menyiapkan diri menghadapi masa depan yang penuh kesempatan dan tantangan. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, diharapkan pembangunan nasional dapat lebih terjamin dan mampu memajukan bangsa di dunia internasional.

Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu misi pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Masalah pemerataan pendidikan sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.



Di Sulawesi Tengah, pendidikan juga menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Salah satu misi pemerintah daerah Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dapat dilihat pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan.

Perkembangan Capaian Pendidikan

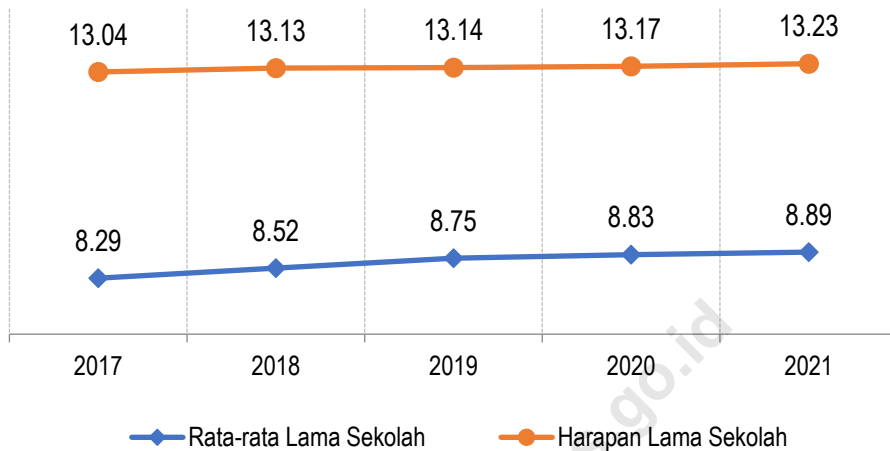
Capaian pendidikan penduduk dapat diukur dengan banyak indikator, salah satunya yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS)/(*expected years of schooling*) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)/(*mean years of schooling*). Kedua indikator ini pula yang digunakan sebagai pengukur dimensi pendidikan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan ditempuh oleh anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah. Pada tahun 2021, HLS Sulawesi Tengah telah mencapai 13,23 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1 atau telah masuk di D2/D3. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka ini terus menunjukkan kenaikan. Cepat lambatnya pertumbuhan angka ini dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan.

Angka HLS merupakan indikator jangka pendek. Indikator ini dapat dengan mudah bergerak jika ada kebijakan baru dalam bidang pendidikan. Karena dipengaruhi oleh kebijakan jangka pendek maka HLS merupakan salah satu indikator proses. Jika suatu tahapan dalam pendidikan tidak berjalan semestinya, atau jika ada kebijakan yang membuka peluang partisipasi sekolah namun tidak lagi bertahan, maka dimungkinkan terjadinya penurunan angka HLS. Satu yang harus diingat bahwa indikator pendidikan mengukur manusianya. Pendidikan itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh fasilitas, infrastruktur dan kebijakan, sebab manusia itu kompleks. Tanpa ada kemauan dari pribadi seseorang untuk meningkatkan taraf pendidikannya, segala fasilitas, infrastruktur dan kebijakan, sebaik apapun itu, tidak akan memberikan dampak yang berarti.



Gambar 2.1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Sulawesi Tengah, 2017-2021 (Tahun)



Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah mempunyai pengertian rata-rata jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Indikator ini dihitung dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas karena mengikuti standar internasional yang digunakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), sehingga dapat dibandingkan hingga level dunia. Selain itu dipilih penduduk umur 25 tahun ke atas karena asumsinya pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting sebagai salah satu komponen pembentuk indeks pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). RLS Sulawesi Tengah pada tahun 2021 telah mencapai 8,89 tahun, setara dengan sedang mengenyam bangku kelas IX atau kelas 3 SMP. Sama halnya dengan HLS, RLS Sulawesi Tengah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Secara umum, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dilihat dari besarnya, tercatat angka harapan lama sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah. Hal ini menjadi wajar, mengingat bahwa dari tahun ke tahun fasilitas pendidikan terus ditambah dan diperbaharui. Upaya ini dapat meningkatkan partisipasi



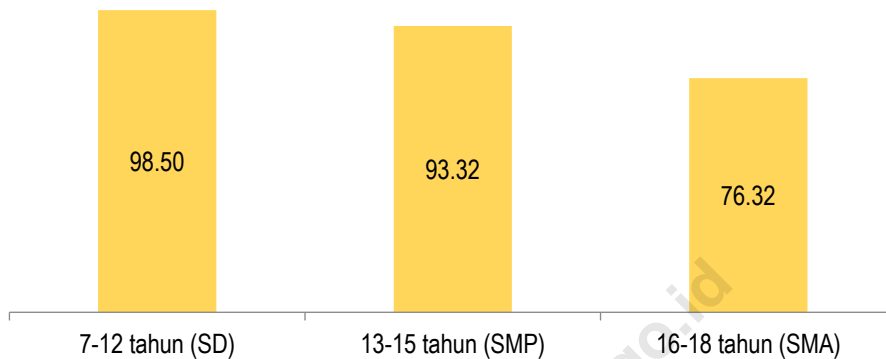
sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas. Semakin tinggi partisipasi sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas, maka harapan lama sekolah akan semakin panjang. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menunjukkan masa pendidikan yang sudah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Seperti yang diketahui bahwa keterjangkauan pendidikan pada masa silam tidak semudah saat ini. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi sekolah pada tahun-tahun tersebut, sehingga rata-rata lama sekolah yang telah ditempuh penduduk usia 25 tahun masih relatif rendah.

Pemerintah Indonesia bersama dengan dunia internasional telah berkomitmen untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam bidang pendidikan yaitu 'menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Adapun target yang ingin dicapai yaitu menjamin semua anak di wilayah Indonesia baik laki-laki maupun perempuan, sampai tahun 2030 dapat menyelesaikan SD-SMP. Dalam prosesnya, hingga tahun 2020 capaian tersebut dapat dilihat berdasarkan angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah ini juga merupakan salah satu indikator capaian pendidikan selain HLS dan RLS. Tingkat partisipasi sekolah mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Beberapa ukuran tingkat partisipasi sekolah yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APS menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Semakin besar APS, maka akan semakin berhasil program peningkatan kualitas pendidikan di suatu daerah. APK menunjukkan proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada usia tertentu. APK dapat bernilai di atas 100 karena terdapat penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu di luar kelompok usia yang seharusnya. Umumnya, hal ini terjadi pada jenjang pendidikan SD karena adanya anak yang belum mencukupi umur 7 (tujuh) tahun yang sudah bersekolah. Sementara itu, APM menggambarkan proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu.



Gambar 2.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022

Secara umum, APS Sulawesi Tengah pada tahun 2021 sudah cukup baik, khususnya pada level pendidikan dasar dan menengah pertama yang masing-masing mencapai 98,5 persen dan 93,32 persen. Pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara. Pemerintah terus mengupayakan agar setiap warga negara dapat menikmati pendidikan dasar hingga sembilan tahun. Sementara itu, nilai APS jenjang usia 16–18 tahun mencapai 76.32 persen.

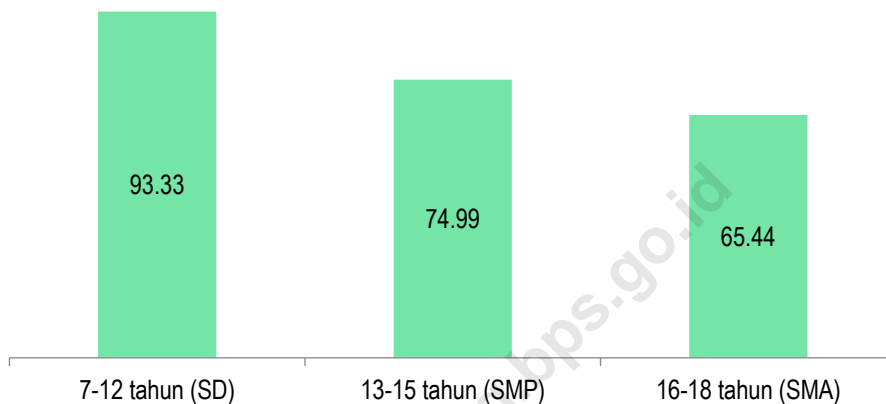
Angka APS untuk jenjang pendidikan menengah atas lebih rendah dibandingkan dengan APS jenjang usia di bawahnya. Hal ini disebabkan banyaknya anak yang tidak melanjutkan sekolah dan memilih terjun ke dunia kerja. Oleh karena itu, peningkatan APS pada jenjang usia ini masih perlu ditingkatkan. Jika diperhatikan, semakin meningkat jenjang usia, nilai APS semakin menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini sangat sayangkan, mengingat upaya pendidikan ini ditujukan untuk mencetak SDM yang berpendidikan tinggi dan unggul agar dapat bersaing dalam skala global, termasuk untuk menghadapi perdagangan bebas ASEAN.

APS dapat digunakan untuk mengukur pemerataan akses pendidikan. Akan tetapi, informasi yang digambarkan oleh APS ini tidak memperhitungkan anak pada kelompok yang bersekolah pada jenjangnya. Contohnya, APS pada jenjang usia 13-15 mengabaikan



anak usia 15 tahun yang sudah bersekolah SMA/ sederajat. Untuk menggambarkan partisipasi sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikannya, maka dapat menggunakan indikator APM.

Gambar 2.3. Angka Partisipasi Murni (APM) di Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022

Pola APM di Sulawesi Tengah hampir sama dengan dengan pola APS di mana angka tertinggi berada pada jenjang SD/ Sederajat, sebesar 93,33 persen. Kemudian semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai APM semakin rendah, yaitu 74,99 persen pada jenjang SMP/ Sederajat dan 65,44 persen pada jenjang SMA/ Sederajat. Rendahnya APM jenjang SMP/ Sederajat dan SMA/ Sederajat menunjukkan bahwa masih banyaknya anak usia 13-15 tahun yang belum merasakan pendidikan SMP/ Sederajat dan anak usia 16-18 tahun yang belum merasakan pendidikan jenjang SMA/ Sederajat.

Kemampuan Membaca dan Menulis Perempuan Lebih Rendah Dibandingkan dengan Laki-Laki

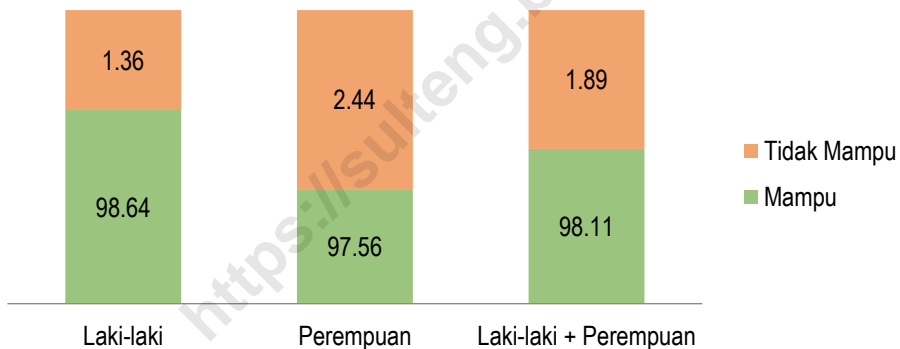
Membaca dan menulis merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang luas. Dengan kemampuan membaca dan menulis, seseorang dapat menjangkau ilmu pengetahuan, menggali potensi, dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa karena sebagian besar aspek kehidupan manusia membutuhkan kemampuan membaca dan menulis. Oleh karena itu, kemampuan baca-tulis penduduk dewasa



dapat dijadikan sebagai ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan.

Angka Melek Huruf (*literacy rate*) menjadi salah satu indikator dasar untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis. Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis. Ukuran angka melek ini diukur pada penduduk usia 15 tahun ke atas karena pada usia tersebut dianggap sebagai masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis.

Gambar 2.4. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Latin di Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021

Apabila dilihat dari kemampuan menguasai huruf latin, sebanyak 98,11 persen penduduk usia 15 tahun ke atas sudah mampu membaca dan menulis huruf latin/alfabet. Jika ditelaah menurut jenis kelamin tampak bahwa persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Pentingnya kemampuan membaca dan menulis khususnya bagi perempuan yaitu mengingat bahwa perempuan akan menjadi calon Ibu yang merupakan sekolah pertama bagi anaknya. Seorang Ibu diharapkan dapat menjadi guru yang akan mengajari dan mendidik anak. Di antara pentingnya seorang ibu dapat membaca dan menulis yaitu untuk mengetahui standar gizi yang seimbang bagi anak. Hal semacam itu dapat diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan melalui membaca dan menulis karena mencari tahu tentang bagaimana



mendidik anak yang baik tidak hanya sekadar asal mengikuti pemikiran dan paradigma lama tentang bagaimana seharusnya mendidik anak.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Salah satu sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai misinya untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah. Adapun beberapa arah kebijakan di antaranya yaitu penyediaan sarana dan prasarana sekolah/ruang kelas yang semakin baik, penyediaan guru berdasarkan bidang ilmu sesuai kebutuhan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas perpustakaan sekolah.

Perbaikan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, serta akses pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan pendidikan. Masalah yang masih terjadi saat ini yaitu tidak meratanya fasilitas-fasilitas tersebut sehingga tidak semua kalangan masyarakat dapat menikmati fasilitas pendidikan yang layak. Oleh karena itu, akses pendidikan berkualitas yang merata menjadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan.

Tabel 2.1. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021/2022

Jenjang Pendidikan	Sekolah (unit)	Guru (orang)	Murid (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
TK/RA	2 025	7 785	66 922
SD/MI	3 125	28 739	331 377
SMP/MTs	1 152	15 669	161 941
SMA/MA	396	7 447	100 566
SMK	184	3 881	46 501

Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022

Pada tahun ajaran 2021/2022, jumlah sekolah di Sulawesi Tengah untuk jenjang SD/ sederajat sebanyak 3.125 unit sekolah. Dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di Sulawesi Tengah sebanyak 2.020, dapat diasumsikan bahwa rata-rata di satu desa/kelurahan memiliki minimal satu fasilitas Sekolah Dasar. Dengan tersedianya



Sekolah Dasar di setiap desa, masyarakat akan lebih mudah berpartisipasi untuk sekolah dengan jarak yang relatif lebih dekat dari tempat tinggal.

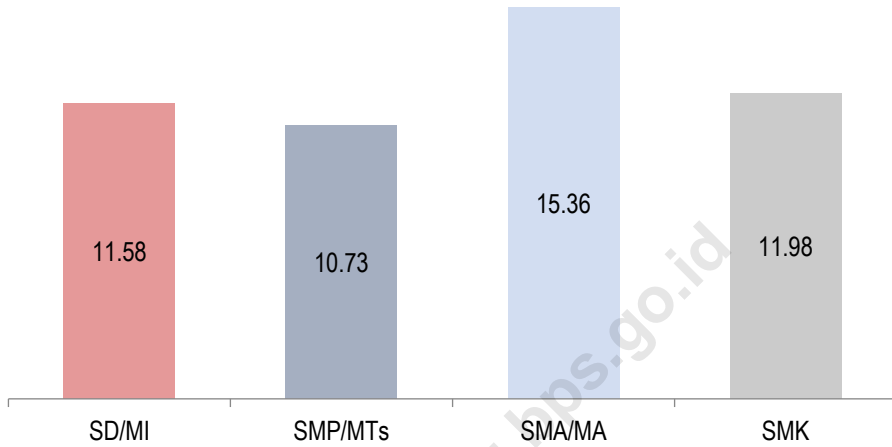
Sementara itu, jumlah sekolah untuk jenjang SMP/Sederajat sebanyak 1.152 unit, untuk jenjang SMA/ sederajat sebanyak 396 unit sekolah, dan untuk SMK sebanyak 184 unit sekolah. Secara umum, jumlah sekolah di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Semakin banyaknya jumlah sekolah ini diharapkan semakin banyak menampung siswa sehingga akan meningkatkan partisipasi sekolah. Tidak hanya itu, keberadaan sekolah ini juga harus didukung oleh akses transportasi yang mudah dan murah bagi masyarakat sehingga keberadaan sekolah ini mudah dijangkau.

Selain keberadaan sekolah, indikator lain yang menggambarkan kualitas pendidikan yang baik yaitu peranan guru di mana dalam proses pembelajaran guru sebagai pendidik memiliki peranan yang sangat krusial. Seorang guru harus mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan baik sehingga peserta didik mampu menyerap ilmu yang diberikan, menjadi teladan yang baik, dan mampu membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Pentingnya peranan guru menjadikan posisi guru menjadi titik sentral dalam pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan.

Rasio murid terhadap guru dapat menggambarkan kapasitas mengajar per satu guru. Secara umum, rasio murid terhadap guru di Sulawesi Tengah cukup baik. Pada tahun ajaran 2021/2022, kapasitas mengajar setiap guru hanya sekitar 11-15 murid. Hal ini menunjukkan bahwa beban mengajar setiap guru tidak terlalu tinggi sehingga diharapkan terciptanya pemanfaatan guru yang lebih efisien. Namun, bukan berarti semakin kecil nilai rasionya maka akan semakin baik. Apabila nilai rasio terlalu kecil, maka akan terjadi inefisiensi pemanfaatan guru yang tersedia. Masalah guru tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, akan tetapi distribusinya juga harus diperhatikan. Selain itu, harus juga diimbangi dengan kualitas guru yang baik untuk dapat mencetak generasi penerus bangsa yang baik pula.



Gambar 2.5. Rasio Murid terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Sulawesi Tengah, 2021/2022



Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022



Tantangan Kesehatan

<http://siakeng.bps.go.id>



TANTANGAN BIDANG KESEHATAN

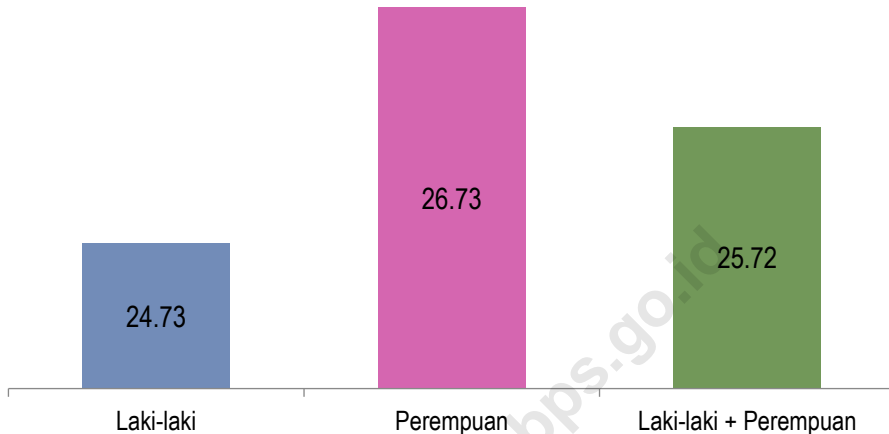
Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Selain pendidikan, kesehatan juga menjadi salah satu dimensi pembangunan manusia yang digencarkan pembangunannya oleh pemerintah. Salah satu pilar utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi suatu negara, yaitu meningkatkan investasi pada sumber daya manusia selain melalui pendidikan, juga melalui bidang kesehatan. Selain mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN, pemerintah juga memberikan 5 persen APBN untuk kesehatan. Secara spesifik, anggaran kesehatan pada tahun 2021 baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah meningkat pesat untuk menangani pandemi Covid-19. Diharapkan dengan besarnya anggaran tersebut dapat menghasilkan sumber daya manusia yang baik dan sehat, maka sehingga dapat turut aktif dalam pembangunan nasional.

Morbiditas sebagai Gambaran Resistensi Masyarakat

Morbiditas adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Morbiditas ini dapat menjadi salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk secara umum. Semakin kecil angka morbiditas berarti semakin baik penanganan keluhan kesehatan di suatu daerah. Pada tahun 2021 di Sulawesi Tengah setidaknya terdapat 25,72 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 26,16 persen. Menurunnya persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan ini merupakan salah satu tanda meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat di Sulawesi Tengah. Apabila penduduk yang mengalami keluhan kesehatan semakin banyak, itu berarti masyarakat rentan terhadap berbagai macam penyakit yang timbul akibat melemahnya resistensi. Kondisi kesehatan yang buruk selanjutnya akan berpengaruh terhadap usia harapan hidup dan mortalitas.



Gambar 3.1. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Satu Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021

Fakta lain menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir sebesar 26,73 persen, lebih besar dibandingkan dengan laki-laki yang sebesar 24,73 persen. Secara tidak langsung, kondisi ini memberikan peringatan kepada perempuan untuk lebih menjaga kesehatan.

Selanjutnya, dari 25,72 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu di Sulawesi Tengah tahun 2021, sebanyak 68,93 persen di antaranya tidak melakukan berobat jalan. Adapun alasan utama tidak berobat jalan sebagian besar karena melakukan pengobatan sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa keluhan kesehatan yang dialami tidak terlalu parah sehingga masih dapat dilakukan pengobatan sendiri.

Dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan, sebanyak 58,96 persen telah menggunakan jaminan kesehatan, sedangkan sisanya 41,04 persen tidak menggunakan jaminan kesehatan. Terkait jaminan kesehatan, pemerintah telah mengupayakan program jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan



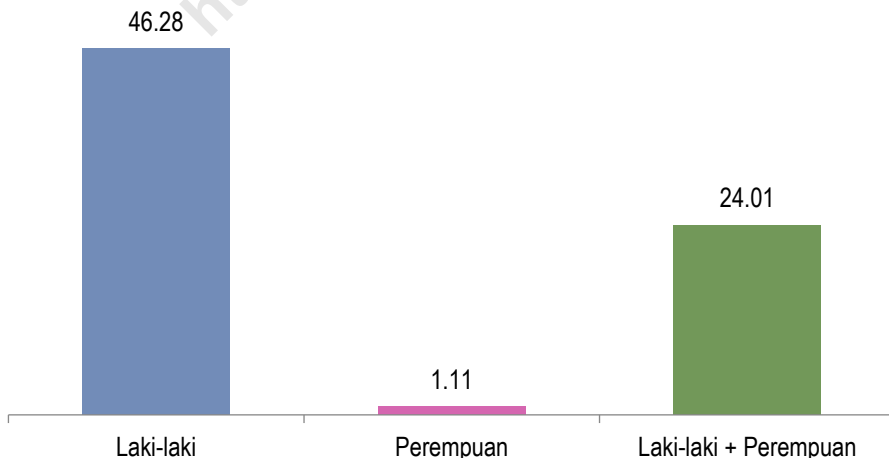
Sosial (BPJS)-Kesehatan yang diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pola Hidup Merokok

Dalam teori Blum, faktor terbesar kedua yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat setelah faktor lingkungan sekitar yaitu perilaku kesehatan. Faktor ini setidaknya menyumbang kurang lebih 30 persen dari tingkat kesehatan manusia. Salah satu contoh sederhana dari perilaku yang sehat adalah dengan tidak merokok. Namun sayangnya, merokok kini seolah menjadi suatu trend, terutama bagi penduduk laki-laki.

Seperti yang sudah diketahui secara umum bahwa rokok mengandung banyak racun yang menyebabkan berbagai penyakit, seperti kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan, dan penyakit-penyakit lain hingga menyebabkan kematian. Tidak hanya kandungan zat dalam rokok yang berbahaya, akan tetapi asap yang ditimbulkan juga menjadi polutan bagi lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, bahaya rokok tidak hanya mengancam penggunanya, akan tetapi juga orang-orang di sekitarnya.

Gambar 3.2. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Sebulan Terakhir Merokok Tembakau Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021

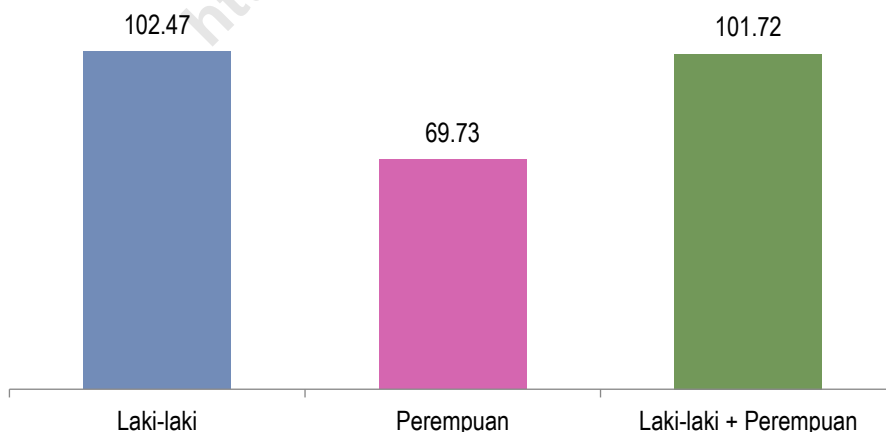
Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan bahwa 24,01 persen penduduk berusia lima tahun ke atas



di Sulawesi Tengah merokok. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 24,40 persen. Apabila hanya dilihat pada jenis kelamin laki-laki saja, maka setidaknya 46,28 persen laki-laki berumur lima tahun ke atas di Sulawesi Tengah merokok. Angka tersebut sangat disayangkan karena hampir separuh dari penduduk laki-laki usia lima tahun ke atas mengkonsumsi rokok.

Mirisnya, jumlah batang rokok yang dihisap para perokok ini tidak sedikit. Pada tahun 2020 rata-rata jumlah batang rokok per minggu yang dihisap perokok di Sulawesi Tengah sebanyak 101,72 batang yang berarti rata-rata per orang merokok lebih dari 10 batang per hari. Tidak hanya itu, persentase perokok yang rata-rata menghabiskan lebih dari 60 batang per minggu sebanyak 74,57 persen. Melihat banyaknya perokok dan jumlah rokok yang dikonsumsi, tidak heran bahwa rokok menjadi salah satu komoditas utama dalam pengeluaran rumah tangga. Bahkan dalam perhitungan Garis Kemiskinan Makanan (GKM), komoditas rokok ini menjadi komoditas penyumbang terbesar kedua setelah beras. Padahal, biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk membeli rokok sebenarnya dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih bermanfaat bagi rumah tangga.

Gambar 3.3. Rata-Rata Jumlah Batang Rokok Per Minggu yang Dihisap Perokok di Sulawesi Tengah, 2021



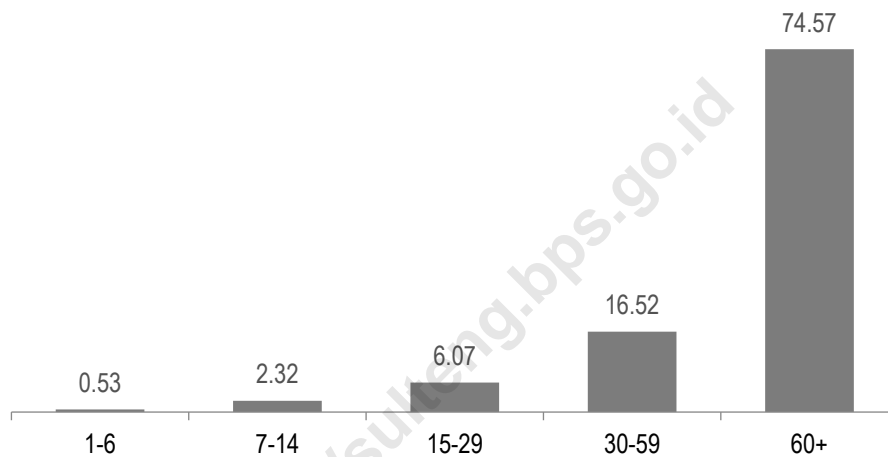
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa bahaya rokok ini tidak hanya dirasakan oleh konsumen rokok itu sendiri, akan tetapi juga orang lain di sekitarnya. Misalkan saja dalam satu rumah tangga terdiri



dari seorang ayah, ibu, dan dua orang anak. Apabila ayah merokok, maka yang bahaya yang ditimbulkan dapat berimbas pada seluruh anggota keluarganya. Dengan kata lain, satu orang yang merokok aktif, empat orang menanggung akibatnya.

Gambar 3.4. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke atas yang Merokok Menurut Jumlah Batang Rokok Rata-Rata Per Minggu yang Dihisap di Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021

Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan juga harus diupayakan dengan mutu dan kualitas yang baik. Tidak hanya dari sisi ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauannya juga harus diupayakan agar adil dan merata.

Pada tahun 2021, seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah telah memiliki fasilitas rumah sakit. Jumlah Rumah Sakit Umum di Sulawesi Tengah sebanyak 40 unit, 14 di antaranya berada di Kota Palu. Selain itu, ketersediaan puskesmas dan posyandu juga menjadi pendukung untuk menjangkau masyarakat di level kecamatan dan desa/kelurahan. Di Sulawesi Tengah, jumlah puskesmas sebanyak 208



unit yang di dalamnya 104 unit melayani rawat inap. Dengan jumlah kecamatan yang sebanyak 175 menunjukkan bahwa setidaknya dalam satu kecamatan rata-rata sudah terdapat minimal satu puskesmas. Selain itu, jumlah posyandu sebanyak 1.933 unit dan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 2.020, berarti setidaknya rata-rata terdapat minimal satu posyandu di masing-masing desa/kelurahan. Jumlah posyandu ini berkurang banyak sejumlah 1.412 unit dari tahun sebelumnya yang sebanyak 3.345 unit.

Tabel 3.1. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021

Jenis Fasilitas Kesehatan (1)	Jumlah (2)
Rumah Sakit Umum	40
Rumah Sakit Khusus	5
Puskesmas Rawat Inap	104
Puskesmas Non Rawat Inap	111
Klinik Pratama	109
Posyandu	1 933

Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022

Untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan, selain ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan posyandu, juga diperlukan tenaga medis yang memadai. Di Sulawesi Tengah pada tahun 2021 jumlah tenaga dokter sebanyak 1.611 orang, terdiri dari 463 dokter spesialis, 976 dokter umum, dan 172 dokter gigi. Jumlah tenaga medis ini mengalami penambahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penambahan jumlah tenaga medis ini diharapkan terus dilakukan mengingat jumlahnya yang masih belum mencukupi, begitu pula dengan fasilitas kesehatannya.

Tabel 3.2. Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021

Tenaga Kesehatan (1)	Jumlah (2)
Dokter	1 615
Perawat	4 257
Bidan	5 736
Farmasi	1 067
Ahli Gizi	472

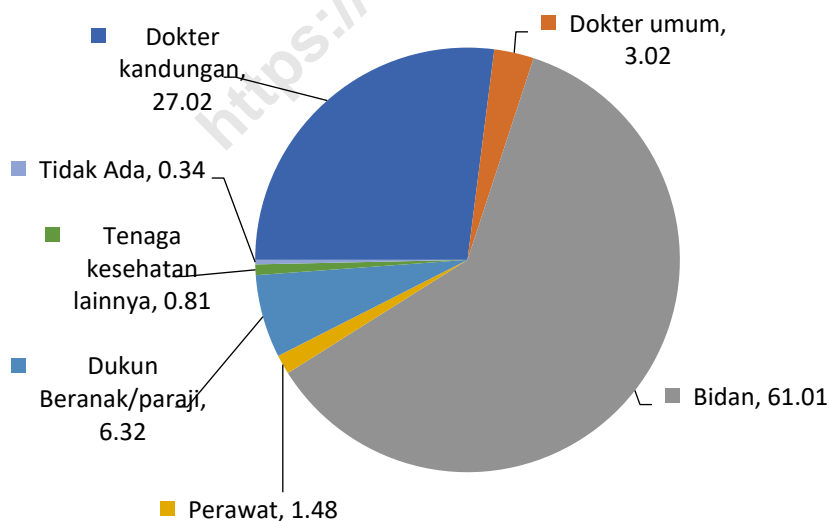
Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022



Apabila dihitung rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk, maka jumlah tenaga kesehatan tersebut masih kurang memadai. Salah satu contohnya, dengan jumlah dokter umum yang hanya 976 orang, sedangkan jumlah penduduk Sulawesi Tengah sebanyak 3,1 juta jiwa, berarti 1 (satu) dokter terbebani sekitar tiga ribu lebih penduduk. Beban ini masih terlalu besar sehingga jumlah dokter masih perlu ditambah lagi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Sulawesi Tengah. Selain itu, jumlah penduduk juga terus meningkat sehingga kebutuhan akan tenaga kesehatan juga akan terus meningkat.

Hal yang penting lainnya terkait fasilitas kesehatan yaitu ketersediaan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak, seperti pelayanan untuk persalinan agar dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya). Persalinan yang ditolong oleh tenaga terdidik dan terlatih akan meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup ibu dan bayi.

Gambar 3.5. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021

Dalam hal tenaga persalinan, masyarakat Sulawesi Tengah umumnya sudah memiliki pilihan untuk menggunakan tenaga kesehatan/medis, terutama bidan (61,01 persen). Selain bidan,



masyarakat Sulawesi Tengah memilih dokter kandungan dalam hal penolong persalinan juga cukup banyak yakni sekitar 27,02 persen. Adapun masyarakat yang menggunakan jasa dokter kandungan sebagian besar merupakan masyarakat perkotaan karena akses pelayanan dokter kandungan di perkotaan relatif lebih mudah dibandingkan di perdesaan. Masyarakat perkotaan lebih memilih dokter kandungan karena mempertimbangkan pengetahuan kesehatan dokter kandungan yang lebih terpercaya.

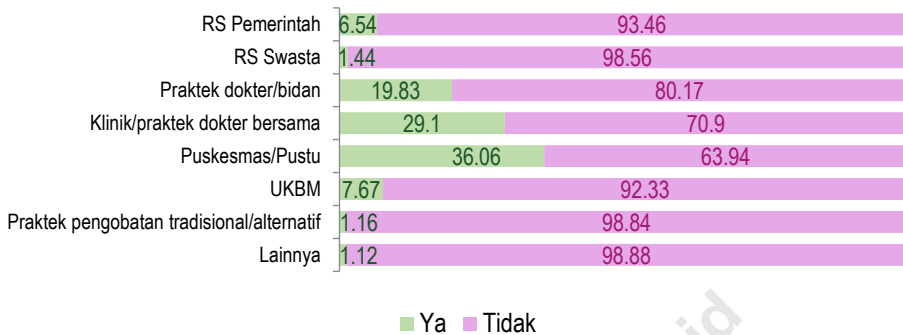
Di sisi lain, masih terdapat pula perempuan di Sulawesi Tengah yang melahirkan yang ditolong oleh dukun beranak/paraji, yaitu sebesar 6,32 persen. Padahal proses persalinan ini seharusnya ditolong oleh tenaga kesehatan agar persalinan berjalan dengan lancar dan aman untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi. Praktik persalinan yang aman menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi, sehingga risiko kematian keduanya dapat diminimalisasi. Secara umum, pengetahuan dan keterjangkauan masyarakat tentang pentingnya penolong kelahiran ini mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini tampak dari persentase perempuan melahirkan yang ditolong oleh tenaga medis sebesar 92,53 persen.

Gambaran tentang penolong persalinan tanpa tenaga kesehatan yang profesional ini lebih umum terjadi di wilayah perdesaan. Manakala bidan sulit didapat maka dukun menjadi alternatif, terutama bagi desa-desa yang jauh dari jangkauan puskesmas. Dengan kondisi demikian mau tidak mau eksistensi dukun bayi tetap strategis. Program pemerintah tidak hanya dengan menambah tenaga medis tetapi juga mengatur distribusinya di setiap wilayah hingga mudah dijangkau oleh masyarakat.

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan layanan kesehatan.



Gambar 3.6. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Jalan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021

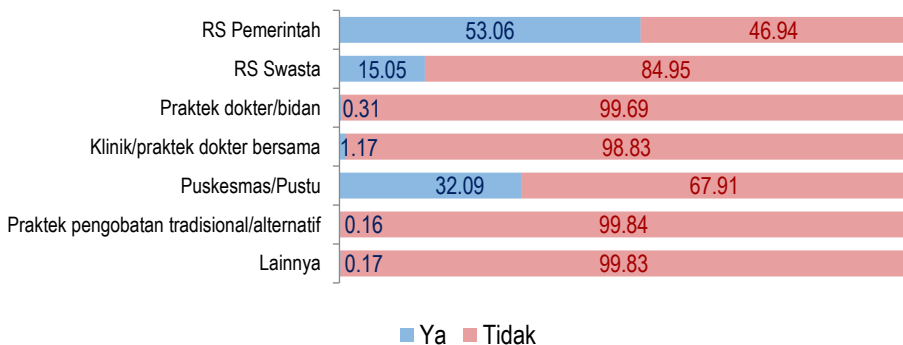


Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021

Dalam hal tempat berobat jalan bagi penduduk yang menjalani pengobatan jalan, yang paling menonjol di Sulawesi Tengah pada tahun 2021 adalah penduduk yang berobat ke Puskesmas/Pustu (Gambar 3.6) dengan persentase 36,06 persen. Preferensi masyarakat ini karena puskesmas dan pustu memiliki akses yang lebih mudah dijangkau, terutama untuk masyarakat di daerah pedesaan.

Berdasarkan tempat rawat inap, mayoritas penduduk yang berobat dengan menjalani rawat inap paling banyak di rumah sakit pemerintah dengan persentase 53,06 persen sedangkan rumah sakit swasta hanya 15,05 persen. Hal ini dimungkinkan karena unit rumah sakit pemerintah lebih terjangkau biaya pelayanannya dibandingkan rumah sakit swasta.

Gambar 3.7. Persentase Penduduk yang Menjalani Rawat Inap Menurut Tempat Rawat Inap di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021



Kondisi Ketenagakerjaan

<http://sumbering.bps.go.id>



KONDISI KETENAGAKERJAAN

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi sangat berperan dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kesempatan kerja dapat menjadi salah satu akar indikator adanya proses pembangunan ekonomi. Ketenagakerjaan selalu menjadi isu nasional yang tak ada habisnya. Peningkatan angka pengangguran sebagai dampak pandemi Covid-19, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah terkait ketenagakerjaan.

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu isu sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar persoalan tersebut tidak meluas dan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Data dan informasi terkait ketenagakerjaan sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah ini baik untuk penyusunan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, pemanfaatan data ketenagakerjaan ini juga sangat berpotensi untuk pembangunan nasional.

Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, dan persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha.

Angkatan Kerja sebagai Modal Pembangunan

Sumber daya manusia yang produktif dapat diartikan sebagai penduduk usia kerja yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Adapun batas bawah usia kerja (*economically active population*) yaitu 15 tahun. Dalam konsep ketenagakerjaan, penduduk usia kerja terbagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan



namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara itu, bukan angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan lainnya).

Sepanjang periode 2017 – 2021, tercatat jumlah angkatan kerja di Sulawesi Tengah pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5,36 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2018. Naik turunnya hal tersebut dipicu oleh dinamika jumlah penduduk yang bekerja di lapangan usaha pertanian.

Tabel 4.1. Jumlah Angkatan Kerja di Sulawesi Tengah, 2017 – 2021 (Agustus) (ribu orang)

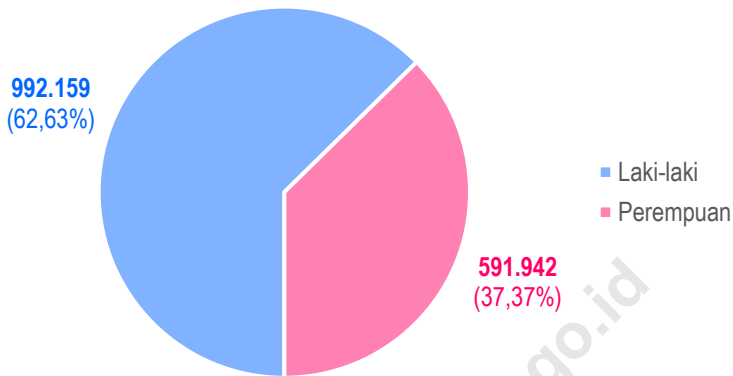
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah	1 428,58	1 502,97	1 513,04	1 575,73	1 584,10
Pertumbuhan	-5,36	5,21	0,67	4,14	0,53

Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka

Secara umum, peningkatan angkatan kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi diharapkan berujung pada peningkatan ekonomi di Sulawesi Tengah. Angkatan kerja tersebut dapat menjadi modal pembangunan bagi Sulawesi Tengah. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini harus benar-benar diserap dalam kegiatan ekonomi dengan baik agar mendorong perekonomian di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, kondisi tersebut harus didukung tersedianya lapangan kerja yang memadai. Jika tidak dapat ditampung dengan baik, besarnya angkatan kerja ini justru akan membawa dampak sosial bagi pembangunan. Tingginya beban demografi dan angka pengangguran justru akan berdampak buruk bagi perekonomian, sosial, dan politik.



Gambar 4.1. Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Tengah, Agustus 2021



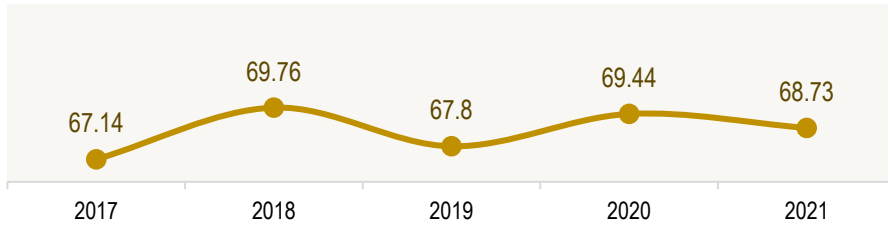
Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah angkatan kerja di Sulawesi Tengah masih didominasi oleh laki-laki, sekitar 992 ribu jiwa atau sekitar 62,63 persen dari total angkatan kerja yang ada pada Agustus 2021. Sebaliknya, jumlah penduduk usia kerja yang bukan merupakan angkatan kerja didominasi oleh perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja antara lain dipengaruhi faktor budaya di mana peran perempuan masih dituntut untuk mengurus rumah tangga sedangkan laki-laki bertugas untuk mencari nafkah. Kondisi ini dapat dilihat dari jumlah penduduk usia kerja yang mengurus rumah tangga sebanyak 91 persen di antaranya merupakan perempuan.

Partisipasi angkatan kerja yang diukur dengan TPAK berguna untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang berpotensi untuk aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi angka TPAK menandakan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi (*labour supply*) semakin banyak. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang penting untuk digunakan sebagai bahan analisis dan ukuran capaian hasil pembangunan.



Gambar 4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sulawesi Tengah, 2017 – 2021 (Agustus)



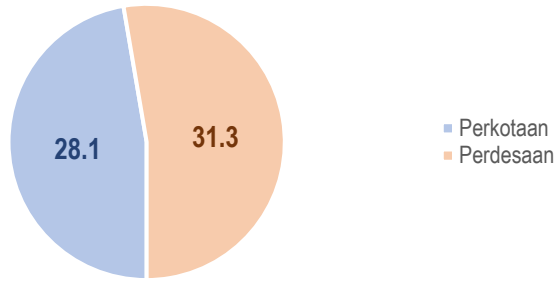
Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka

Angka TPAK Sulawesi Tengah pada tahun 2021 sebesar 68,73 (periode Agustus). Artinya 68,73 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, sisanya bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya). Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Sulawesi Tengah semakin meningkat. Pada tahun 2021, angka TPAK Sulawesi Tengah ini mengalami penurunan 0,71 poin dibandingkan tahun 2020.

Dari seluruh angkatan kerja yang tersedia, tidak semua terserap di lapangan pekerjaan. Selain analisis angkatan kerja, dalam bidang ketenagakerjaan juga dikenal indikator pengangguran yang diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.



Gambar 4.3. Pengangguran Menurut Jenis Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Tengah, Agustus 2021 (ribu jiwa)

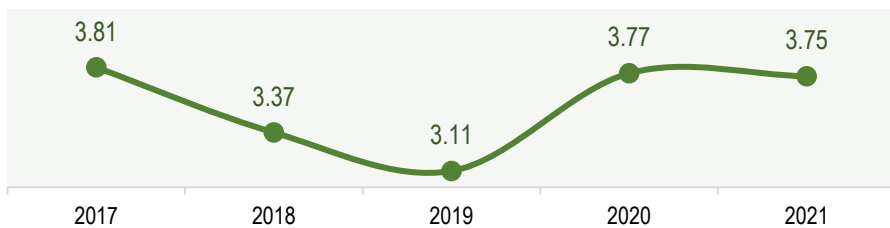


Sumber: Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah 2021

TPT di Sulawesi Tengah pada tahun 2021 sebesar 3,75 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 59,37 ribu jiwa. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, kondisi tahun 2021 menunjukkan jumlah pengangguran di perkotaan sedikit lebih banyak dibandingkan di daerah perdesaan. Jumlah pengangguran di daerah perdesaan sebanyak 31,3 ribu orang dan daerah perkotaan sebanyak 28,1 ribu orang. Lebih banyaknya pengangguran di perdesaan ini dapat menjadi informasi bagi pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah perdesaan.

Pada periode Agustus 2021, TPT Sulawesi Tengah mengalami penurunan sebesar 0,02 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Hal ini dipengaruhi pelanggaran aturan aktivitas selama pandemi Covid-19 karena sebagian besar masyarakat sudah melakukan vaksin kedua maupun vaksin booster. Diharapkan angka TPT di periode Agustus tahun berikutnya menurun mengingat sudah mulai berangsur normalnya kondisi perekonomian di Indonesia, terlebih lagi di Provinsi Sulawesi Tengah dengan tingginya pertumbuhan ekonomi.

Gambar 4.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah, 2017 – 2021 (Agustus)



Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka



Lapangan Usaha Pertanian Mendominasi Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Tengah tersebar di seluruh jenis lapangan usaha yang ada. Sebagian besar tenaga kerja di Sulawesi Tengah terserap pada lapangan usaha pertanian, yaitu sekitar 629,37 ribu jiwa atau 41,28 persen dari total penduduk yang bekerja pada tahun 2021 (periode Agustus). Hal ini menunjukkan lapangan usaha pertanian mampu menyerap tenaga kerja dengan baik karena merupakan lapangan usaha yang padat karya.

Jika dilihat dari kontribusi tiap lapangan usaha terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021, maka lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah Industri Pengolahan dengan kontribusi sekitar 29 persen. Meskipun demikian, tenaga kerja di Industri Pengolahan tidak sebanyak lapangan usaha Pertanian.

Tabel 4.2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Sulawesi Tengah, Agustus 2021

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	629 374	41,28
B Pertambangan dan Penggalian	31 460	2,06
C Industri Pengolahan	101 238	6,64
F Konstruksi	8 453	0,55
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2 585	0,17
H Transportasi dan Pergudangan	89 644	5,88
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	239 694	15,72
K Jasa Keuangan dan Asuransi	42 857	2,81
M,N Jasa Perusahaan	59 204	3,88
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7 576	0,51
P Jasa Pendidikan	14 793	0,97
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	513	0,03
R,S,T,U Jasa Lainnya	14 691	0,96
Lainnya (Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Real Estate)	125 971	8,26
Total	1 524 730	100,00

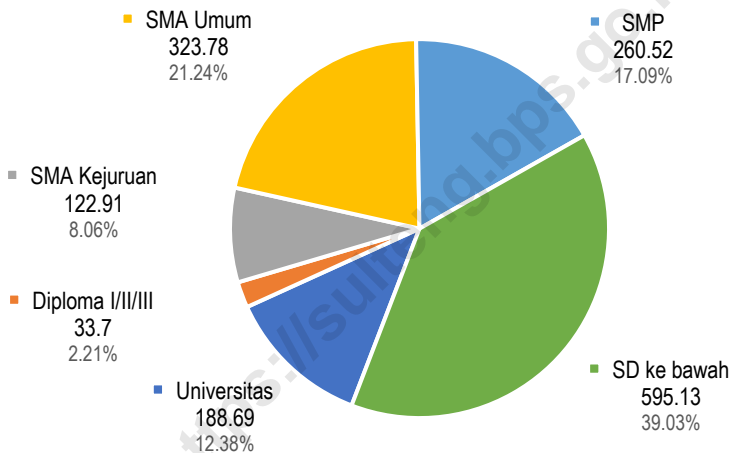
Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022



Potret Ketenagakerjaan Menurut Pendidikan

Perkembangan ketenagakerjaan tidak hanya terfokus pada peningkatan jumlah tenaga kerja, akan tetapi juga harus didukung dengan kualitas yang mumpuni. Kualitas SDM yang baik akan menjadi modal bagi Sulawesi Tengah untuk bersaing baik di level nasional maupun internasional. Tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan daya saing untuk memasuki pasar tenaga kerja global.

Gambar 4.5. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan di Sulawesi Tengah, Agustus 2021 (ribu jiwa)



Sumber: Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah Agustus 2021

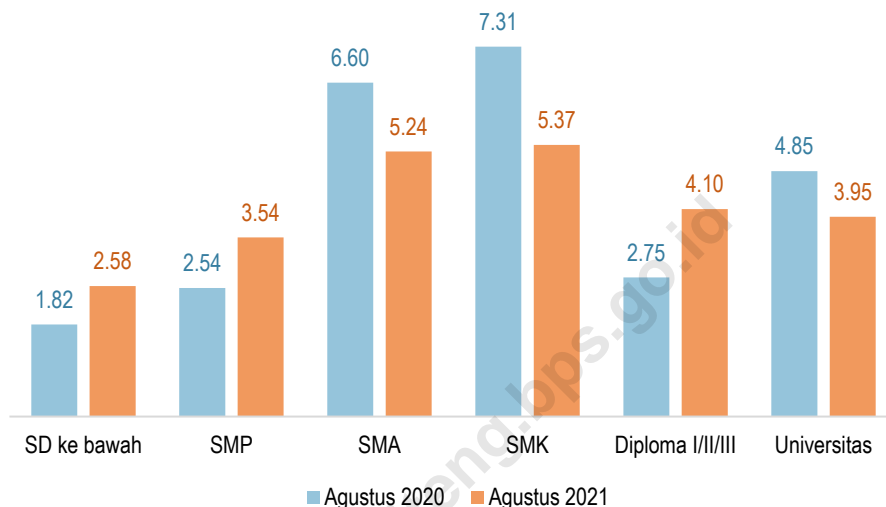
Kualitas tenaga kerja di Sulawesi Tengah saat ini masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar tenaga kerja di Sulawesi Tengah merupakan lulusan Sekolah Dasar atau lebih rendah. Dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, 39 persen di antaranya lulusan SD ke bawah. Persentase lulusan terbesar kedua yaitu SMA/ sederajat sebesar 21 persen. Tenaga kerja yang hanya lulusan SD berkonsekuensi akan lebih banyak terserap pada kegiatan yang padat karya karena keterbatasan pada literasi teknologi.

Kembali pada pembahasan tentang penyerapan tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar tenaga kerja di Sulawesi Tengah terserap pada lapangan usaha pertanian. Secara tidak langsung, komposisi tenaga kerja berdasarkan pendidikan dan lapangan usaha ini menggambarkan bahwa potret tenaga kerja di Sulawesi



Tengah masih didominasi oleh tenaga kerja pertanian dan tingkat pendidikan yang rendah.

Gambar 4.6. Perkembangan TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2020 – 2021



Sumber: Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah Agustus 2021

TPT tahun 2021 menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan SMK dan SMA memiliki angka TPT tertinggi yaitu masing-masing sebesar 5,37 persen dan 5,24 persen. Begitu juga pada tahun 2020 di mana jenjang SMK dan SMA memiliki TPT terbesar. Rendahnya TPT SD ke bawah dikarenakan semakin rendah tingkat pendidikan, terutama lulusan SD atau bahkan di bawahnya, mereka akan cenderung lebih banyak menerima semua jenis pekerjaan sehingga lebih banyak terserap dalam dunia usaha, terutama untuk pekerjaan yang padat karya.



Tabel 4.3. TPAK dan TPT di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, Agustus 2021

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
(1)	(2)	(3)
Banggai Kepulauan	2,95	71,98
Banggai	3,57	71,80
Morowali	5,08	63,75
Poso	2,47	73,54
Donggala	3,50	67,47
Tolitoli	3,13	64,04
Buol	3,64	67,52
Parigi Moutong	2,97	68,82
Tojo Una Una	3,44	74,86
Sigi	2,38	70,76
Banggai Laut	3,35	61,42
Morowali Utara	2,98	68,47
Palu	7,61	65,07
Sulawesi Tengah	3,75	68,73

Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022



Pola Konsumsi dan Ketimpangan Rumah Tangga



POLA KONSUMSI DAN KETIMPANGAN RUMAH TANGGA

Pola konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya. Keduanya akan membentuk pola kebiasaan tertentu dalam mengonsumsi barang dan jasa pada suatu kelompok masyarakat. Pola konsumsi masyarakat dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan melalui besaran nilai rupiah yang dibelanjakan. Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dapat menunjukkan tingkat kemampuan daya beli yang selanjutnya akan menggambarkan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi daya beli masyarakat maka akan semakin tinggi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menunjukkan semakin sejahtera masyarakat tersebut.

Pengeluaran rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok makanan dan non makanan. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut cenderung berpenghasilan rendah. Sebaliknya, semakin tinggi penghasilan rumah tangga, maka akan semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan dengan persentase pengeluaran untuk nonmakanan.

Pola Konsumsi Kembali Bergeser

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Proses pemulihan pandemi Covid-19 nampak berpengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan konsumsi masyarakat. Pada tahun 2021, 38,56 persen penduduk di Sulawesi Tengah masuk dalam golongan pengeluaran perkapita sebulan satu juta atau lebih. Angka



tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 36,94 persen.

Tabel 5.1. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per kapita Sebulan di Sulawesi Tengah, 2021

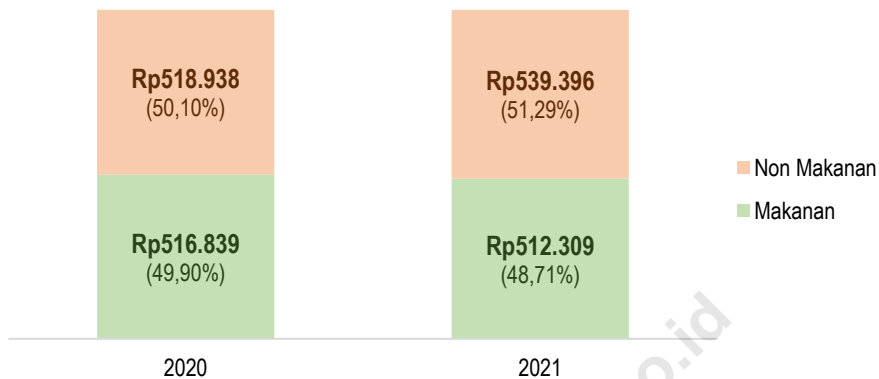
Golongan Pengeluaran	Persentase Penduduk
(1)	(2)
< 150 000	-
150 000–199 999	-
200 000–299 999	0,81
300 000–499 999	12,12
500 000–749 999	28,35
750 000–999 999	20,16
1 000 000–1 499 999	22,39
≥ 1 500 000	16,17
Jumlah	100

Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022

Selanjutnya, apabila dilihat menurut jenis pengeluaran, maka akan tampak komposisi pengeluaran yang digunakan untuk komoditas makanan maupun non makanan. Pada tahun 2021, pengeluaran makanan sebesar Rp512,31 ribu (48,71 persen), sedangkan non makanan sebesar Rp539,40 ribu (51,29 persen). Komposisi pengeluaran non makanan meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 50,10 persen. Pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku baru yang mendorong masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa yang terkait seperti obat-obatan atau suplemen, masker, dan layanan tes antibodi, antigen maupun tes *polymerase chain reaction* (PCR). Demikian pula peningkatan konsumsi layanan jasa telekomunikasi karena proses pekerjaan dan belajar yang dilakukan dari rumah.



Gambar 5.1. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Sulawesi Tengah, 2020 – 2021



Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022

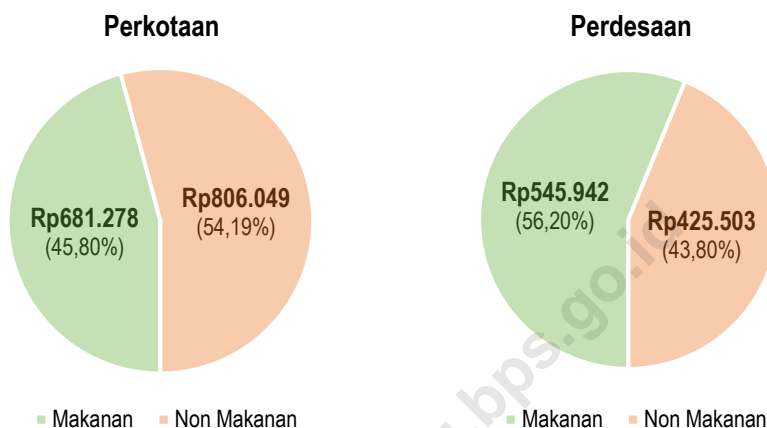
Lebih dalam lagi, jika melihat pengeluaran masyarakat berdasarkan daerah tempat tinggal diketahui bahwa rata-rata pengeluaran penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Pengeluaran perkapita sebulan di daerah perkotaan sebesar Rp1,49 juta, sedangkan di daerah perdesaan sebesar Rp971 ribu. Perbedaan ini selain karena kemampuan finansial yang berbeda, kebutuhan barang dan jasa lebih banyak tersedia di perkotaan daripada perdesaan, sehingga konsumsi masyarakat di daerah perdesaan lebih terbatas dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan.

Dari sisi pola konsumsi, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di perdesaan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan makanan daripada nonmakanan. Sebaliknya, untuk penduduk yang tinggal di perkotaan, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan cenderung lebih banyak digunakan untuk konsumsi non makanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Penduduk di daerah perdesaan masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan. Ketersediaan barang dan jasa di perkotaan pun lebih beragam, terutama nonmakanan, sehingga pola konsumsi masyarakat perkotaan terhadap komoditas nonmakanan pun lebih beragam. Hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya penduduk di perdesaan yang melakukan migrasi ke perkotaan agar dapat hidup lebih sejahtera. Ketimpangan ini perlu terus diminimalisasi dengan memperkuat pembangunan di daerah perdesaan, sesuai



dengan tujuan ke-10 SDGs yang merupakan salah satu pilar ekonomi, yaitu 'Mengurangi Ketimpangan.'

Gambar 5.2. Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan di Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022

Tingkat Kecukupan Gizi

Tujuan kedua dalam pembangunan yang berkelanjutan (SDGs), yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian yang berkelanjutan. Ini menjadi bukti adanya perhatian di mata dunia terkait peningkatan gizi masyarakat. Dengan adanya tujuan ini, diharapkan setiap orang memiliki ketahanan pangan yang baik untuk menuju hidup yang sehat.

Sejalan dengan kesepakatan dunia yang tertuang dalam SDGs tersebut, agenda pembangunan pemerintah yang tertuang dalam Nawacita juga menjadikan peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat sebagai prioritas pembangunan. Status kesehatan dan gizi sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Disadari bahwa sumber daya manusia yang berkualitas akan juga akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan negara.

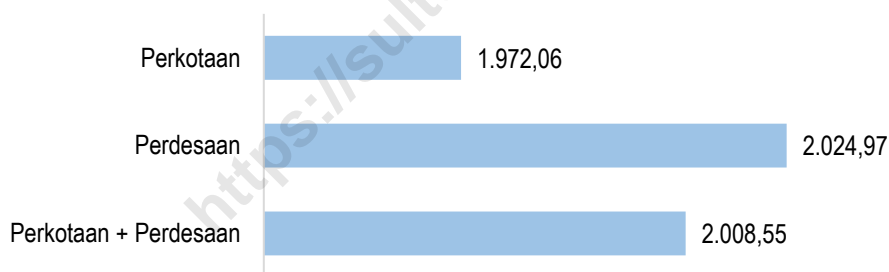
Untuk mencapai status kesehatan dan gizi yang baik, makanan yang dikonsumsi harus dalam jumlah yang cukup, bermutu, dan beragam agar dapat memenuhi berbagai zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Jumlah, mutu, dan keragaman makanan yang dikonsumsi suatu



rumah tangga sangat ditentukan oleh tingkat perekonomian rumah tangga. Semakin baik kondisi perekonomian suatu rumah tangga, daya beli akan semakin tinggi, sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan baik dari sisi jumlah, mutu, maupun keragamannya akan semakin baik. Dari sini tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tergambarkan melalui makanan yang dikonsumsi.

Status gizi diukur berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Standar kecukupan konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia per kapita per hari berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia yang berbunyi, "Rata-Rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kilo kalori dan 57 gram per orang per hari pada tingkat konsumsi".

Gambar 5.3. Rata-Rata Konsumsi Kalori (kkal) per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Tengah, 2021

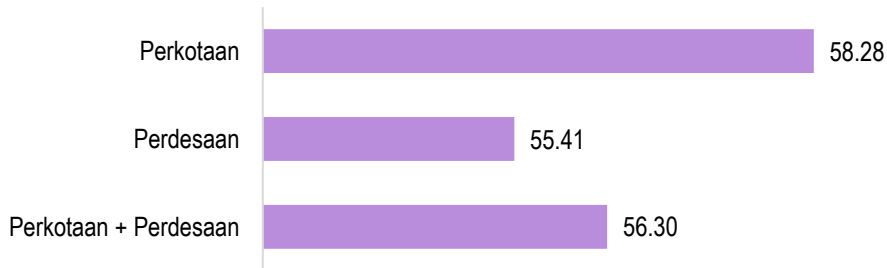


Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, rata-rata konsumsi kalori penduduk Sulawesi Tengah sebanyak 2.008,55 kkal dan 56,30 gram protein per kapita per hari. Konsumsi ini belum memenuhi standar kecukupan yang telah ditetapkan pemerintah dikarenakan konsumsi kalori yang masih di bawah angka yang dianjurkan pemerintah. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar 2.039,84 kkal dan 56,30 gram protein per kapita per hari. Dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, konsumsi kalori penduduk di daerah perkotaan lebih sedikit dibandingkan dengan perdesaan. Sedangkan untuk konsumsi protein daerah perkotaan lebih banyak dibanding daerah perdesaan.



Gambar 5.4. Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022

Ketimpangan Rumah Tangga

Ketika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta seluruh masyarakat di daerah tersebut ikut menikmati nilai tambah yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi tersebut secara merata. Sebagian peneliti mensinyalir bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat lebih menguntungkan sebagian besar masyarakat terkaya, sementara masyarakat menengah ke bawah yang jumlahnya lebih banyak justru tertinggal di belakang. Kondisi inilah yang menjadi masalah ketimpangan dalam perekonomian.

Salah satu indikator ketimpangan yang diukur oleh BPS yaitu dengan indeks gini. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk (BPS). Koefisien Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dengan nilai berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Tabel 5.2. Klasifikasi Ketimpangan Indeks Gini

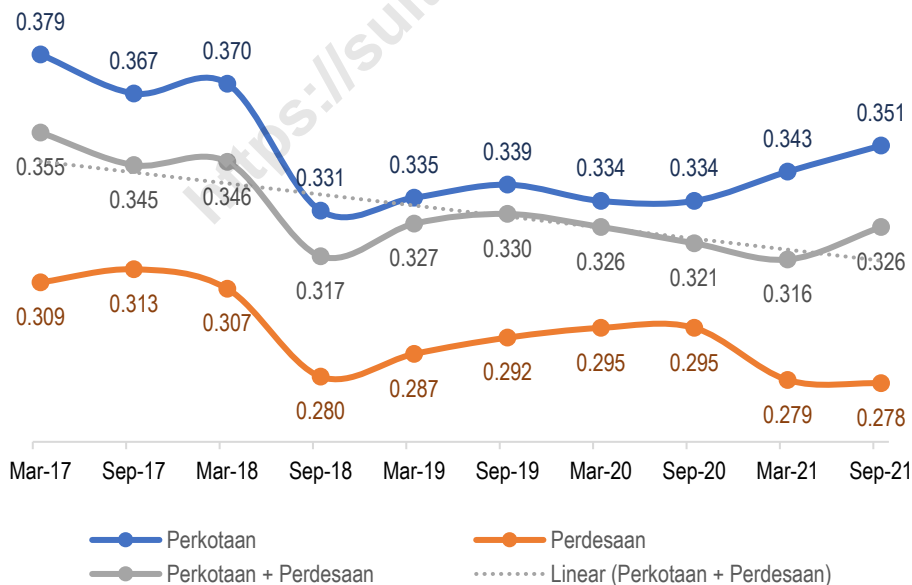
Nilai Indeks Gini (1)	Tingkat Ketimpangan (2)
< 0,35	Rendah
0,35 – 0,50	Sedang
> 0,50	Tinggi



Selama periode 2017-2021 secara umum gini ratio di Sulawesi Tengah terus mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode 2017-2021 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Sulawesi Tengah di tengah pertumbuhan ekonomi yang begitu dinamis. Pada tahun 2021 (periode September), angka gini ratio 0,326 yang berarti ketimpangan pengeluaran masyarakat berada pada tingkat rendah, begitu pula dengan gini ratio daerah perkotaan dan perdesaan yang masing-masing sebesar 0,351 dan 0,278.

Secara umum, dapat dilihat bahwa ketimpangan di daerah perdesaan lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Hal ini menggambarkan kondisi masyarakat di daerah perdesaan lebih homogen, variasi kebutuhan dan tingkat pengeluaran relatif sama. Berbeda dengan perkotaan yang lebih heterogen, tingkat pengeluaran antar rumah tangga lebih bervariasi.

Gambar 5.5. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sulawesi Tengah, 2017 – 2021



Sumber: Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Sulawesi Tengah September 2021



Perumahan dan Lingkungan

<http://ling.bps.go.id>



PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang (pakaian) dan pangan (makanan). Rumah tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dimiliki manusia sebagai tempat untuk berlindung. Lebih luas, pemanfaatan rumah sebagai tempat tinggal tidak hanya sekedar tempat berlindung, akan tetapi harus memenuhi standar kelayakan agar dapat menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesehatan penghuninya. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam rumah tangga, rumah juga menjadi tempat berkumpulnya seluruh anggota keluarga. Interaksi sosial pertama seseorang yaitu dalam keluarga sehingga proses pendidikan anak juga dimulai di dalam rumah. Oleh karena itu, rumah yang layak juga menjadi salah satu faktor pendukung tumbuh kembang anak menjadi generasi yang berkualitas. Pentingnya kelayakan rumah tinggal ini dapat terlihat dari perhatian dunia melalui salah satu tujuan dalam agenda Pembangunan Berkelanjutan atau yang sering disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui tujuannya yang kesebelas yaitu menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, rumah juga menjadi salah satu indikator status sosial seseorang. Semakin tinggi tingkat sosial seseorang, semakin lengkap fasilitas rumah yang dimiliki dan juga menunjukkan tingkat kesejahteraan pemiliknya. Logikanya, semakin sejahtera suatu rumah tangga maka kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selain makanan akan semakin tinggi, sehingga kemampuan untuk memperbaiki fasilitas rumah juga semakin tinggi.



Kepemilikan dan Kualitas Rumah Tinggal

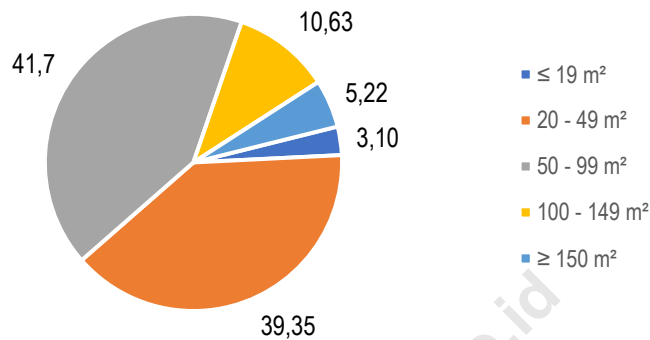
Berdasarkan kepemilikan, pada tahun 2021 di Sulawesi Tengah persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 84,46 persen. Pentingnya status kepemilikan rumah ini sebagai indikasi kesejahteraan masyarakat. Dengan menguasai rumah milik sendiri, diharapkan suatu rumah tangga lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan yang lain karena kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang telah mampu dipenuhi. Selain itu, dari sisi psikologis, status penguasaan rumah milik sendiri akan memberikan ketenangan bagi penghuninya dibandingkan dengan menempati rumah sewa atau bebas sewa.

Uniknya, apabila dilihat di masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, persentase rumah tangga yang memiliki rumah tinggal milik sendiri yang paling rendah yaitu Kota Palu, hanya 58,50 persen. Fenomena ini dapat disebabkan oleh tingginya tingkat migrasi penduduk di Kota Palu dibandingkan kabupaten/kota lainnya, di mana para migran tersebut tidak serta merta membeli rumah di Kota Palu. Selain itu, harga tanah di Kota Palu yang cenderung lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain menyebabkan peluang untuk memiliki rumah sendiri juga semakin kecil.

Terkait kualitas, kelayakan rumah tempat tinggal perlu dilihat dari komponen material pembentuknya seperti luas lantai hunian, jenis atap, lantai dan dinding. Setiap komponen pembentuk rumah turut mempengaruhi keamanan, kenyamanan, dan kesehatan penghuninya. Rumah tinggal yang dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal tersebut.



Gambar 6.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah di Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021

Dari sisi luas lantai, sebesar 41,7 persen rumah tangga di Sulawesi Tengah telah menghuni rumah dengan luas lantai 50-99 m² dan 39,35 persen dengan luas lantai 20-49 m². Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga sehingga tingkat kelayakan tidak cukup dilihat dengan luas rumah dalam sebuah rumah tangga. Namun, penting untuk melihat jumlah anggota rumah tangga yang menghuni rumah tersebut. Oleh karena itu kelayakan rumah lebih mudah diukur dengan luas hunian per kapita.

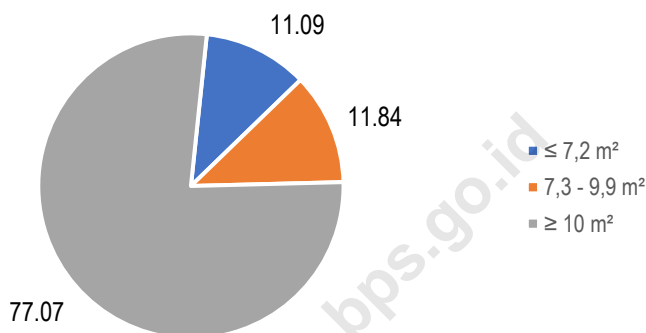
Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian dan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m².

Untuk kondisi Sulawesi Tengah, sebanyak 77,07 persen rumah tangga telah menghuni rumah dengan luas lantai 10 m² atau lebih per kapita. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah



menghuni rumah dengan luas yang layak sesuai dengan kriteria baik yang disarankan WHO maupun pemerintah Indonesia. Sementara itu, masih terdapat 11,09 persen rumah tangga yang menghuni rumah dengan luas lantai per kapita seluas $\leq 7,2$ m².

Gambar 6.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah Per Kapita di Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021

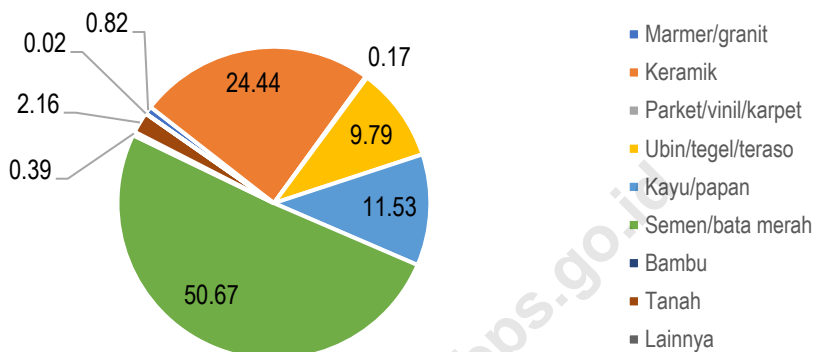
Selain luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Jenis lantai rumah tempat tinggal dapat mempengaruhi kondisi kesehatan penghuninya. Lantai rumah yang baik adalah lantai rumah yang tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak basah pada musim hujan, sehingga penularan penyakit dapat dihindari. Jenis lantai yang memenuhi kriteria tersebut yaitu lantai yang berasal dari ubin atau semen, bukan dari tanah. Lantai tanah cenderung lembab dan tidak memenuhi kriteria lantai yang sehat. Lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacangan dan penyakit kulit.

Jenis lantai ini juga dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat. Melalui jenis lantai, kesejahteraan masyarakat tersebut dilihat dari tingkat kualitas perumahan yang dimiliki rumah tangga tersebut. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Rumah tangga dengan jenis lantai keramik atau marmer diasumsikan mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada rumah tangga yang mempunyai jenis lantai semen, ubin, atau tanah. Di Sulawesi Tengah, mayoritas rumah tangga menghuni rumah dengan lantai terluas



semen/bata merah, sebanyak 50,67 persen. Sementara itu, masih terdapat 2,16 persen yang masih menghuni rumah tinggal dengan luas lantai berupa tanah.

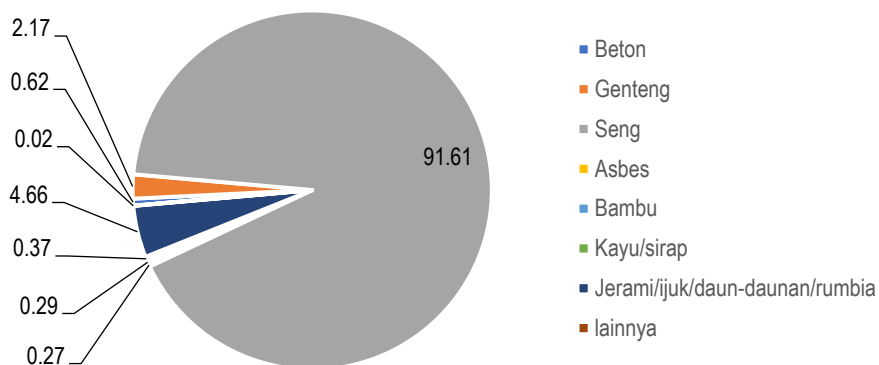
Gambar 6.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Rumah di Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021

Selain dari komponen jenis lantai, kualitas rumah tinggal juga dapat dilihat dari jenis atap dan dinding terluas. Sama halnya dengan jenis lantai, jenis atap dan dinding juga dapat menggambarkan kesejahteraan rumah tangga di mana semakin baik kualitas atap dan dinding rumah maka kesejahteraan rumah tangga tersebut akan semakin baik. Di Sulawesi Tengah ini mayoritas rumah tangga menggunakan seng sebagai atap rumah tinggal sebanyak 91,61 persen.

Gambar 6.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Rumah di Sulawesi Tengah, 2021

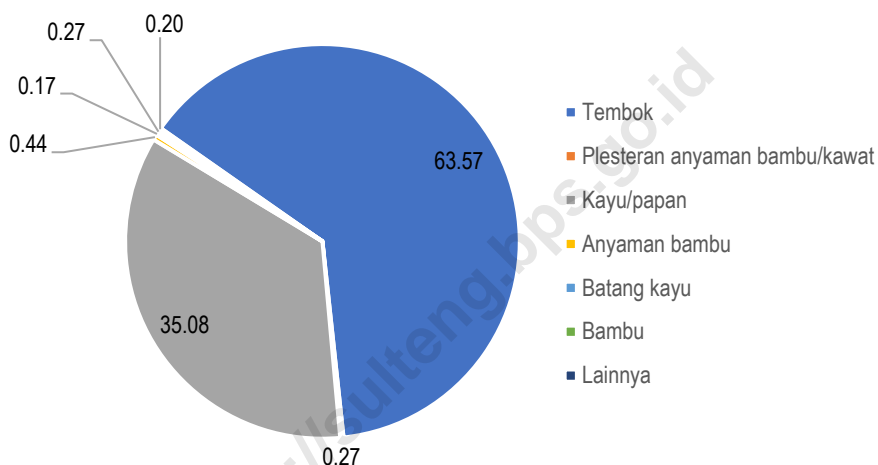


Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021



Sementara itu, berdasarkan material pembentuk dinding terluas, rumah tinggal masyarakat di Sulawesi Tengah didominasi oleh dinding tembok dan kayu. Sebanyak 63,57 persen rumah tangga telah memiliki rumah yang berdinding tembok dan 35,08 persen menggunakan kayu/papan. Hal ini menunjukkan kualitas dinding rumah masyarakat sebagian besar telah memenuhi standar layak.

Gambar 6.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas rumah tinggal masyarakat selain dilihat dari komponen material pembentuk, juga diperlukan fasilitas penunjang sehari-hari seperti sumber air minum bersih, sanitasi yang layak, dan sumber penerangan yang memadai. Kelengkapan fasilitas pokok rumah tinggal akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang kemudian turut menentukan kualitas rumah tinggal tersebut.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Dalam tujuan SDGs yang pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun, salah satu indikator yang digunakan yaitu



persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, dalam tujuan keenam yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, ketersediaan sumber air minum layak dan berkelanjutan ini juga menjadi salah satu indikator. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya masalah ketersediaan air minum layak bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Sumber Air Minum di Sulawesi Tengah, 2021

Sumber Air Minum Bersih		Sumber Air Minum Layak	
Air Bersih	Tidak	Air Bersih	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)
76,81	23,19	88,51	11,49

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021

Air minum layak dan bersih adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), kran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Di Sulawesi Tengah, masih terdapat 23,19 persen rumah tangga yang belum menggunakan air minum yang bersih. Sementara itu, dari sisi kelayakan dan keberlanjutan, hanya sebesar 11,49 persen rumah tangga yang belum menggunakan air minum layak dan berkelanjutan.

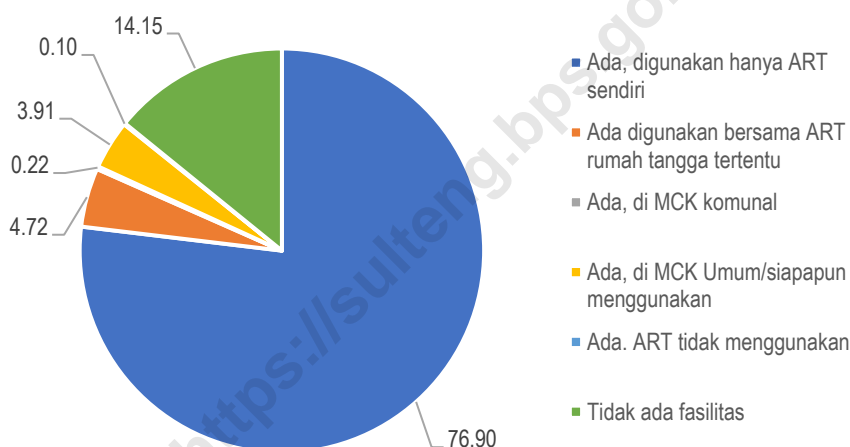
Sumber air minum yang layak sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Apabila air minum yang dikonsumsi merupakan air minum yang tidak layak, maka akan rentan terhadap penyakit khususnya diare. Kondisi tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak harus tumbuh dengan baik dan sehat agar terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang.

Selanjutnya, fasilitas rumah tangga yang sangat perlu untuk diperhatikan yaitu masalah sanitasi, salah satunya yaitu ketersediaan sarana jamban. Apabila ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan,



pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan, terutama tanah dan sumber air yang berujung pada tingkat kesehatan masyarakat di sekitar lingkungan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Di Sulawesi Tengah hingga tahun 2021, masih terdapat 14,15 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 16,75 persen, angka ini mengalami perbaikan.

Gambar 6.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021

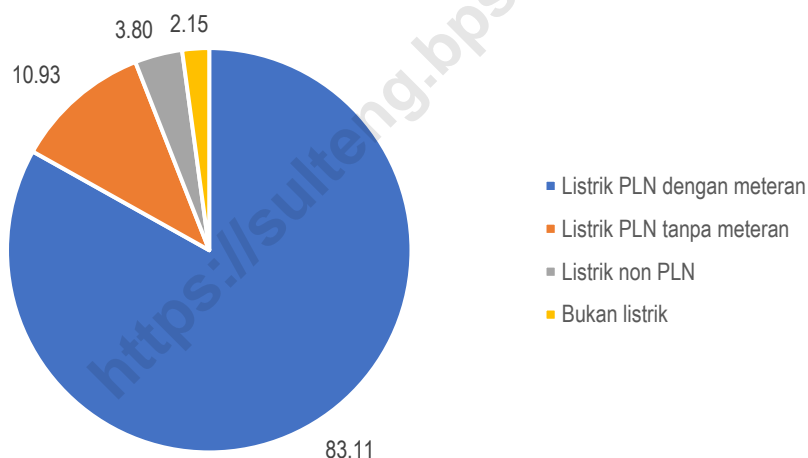
Kelayakan fasilitas buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan juga perlu dilihat dari jenis kloset dan tempat pembuangan akhir tinja di mana yang dianjurkan yaitu kloset leher angsa dengan tempat pembuangan tangki septik/SPAL. Di Sulawesi Tengah, dari rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar, sudah 94,53 persen rumah tangga yang sudah menggunakan kloset leher angsa. Sementara itu, menurut tempat pembuangan akhir tinja, 91,10 persen rumah tangga sudah menggunakan tangki septik, sedangkan sisanya masih menggunakan kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang /kebun, dan lainnya.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting yaitu penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah listrik (PLN dan Non PLN),



karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Adapun rumah tangga yang sudah dijangkau oleh listrik PLN pada tahun 2021 yaitu sebesar 83,12 persen menggunakan meteran dan 10,93 persen tanpa meteran. Sementara itu, 3,8 persen menggunakan listrik yang berasal dari selain PLN. Kemudian sebesar 2,15 persen rumah tangga di Sulawesi Tengah belum menggunakan listrik. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase rumah tangga yang belum menggunakan listrik ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,99 persen. Pemerintah melalui PLN akan terus berupaya agar ketersediaan listrik dapat menjangkau hingga ke pelosok daerah di seluruh Indonesia.

Gambar 6.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan di Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021



Potret Kemiskinan

<https://liteng.bps.go.id>



POTRET KEMISKINAN

Gambaran kesejahteraan masyarakat paling mudah memang dilihat dari tingkat kemiskinan. Namun, kemiskinan ini sendiri pada dasarnya merupakan suatu indikator yang multidimensi. Kemiskinan tidak hanya mencakup kondisi ekonomi, akan tetapi kondisi sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan seperti menjadi mata rantai yang dapat menjadi sebab dan sekaligus menjadi akibat dari masalah-masalah sosial dan ekonomi lainnya. Tidak hanya pada level mikro, masalah kemiskinan ini juga berimbas pada kondisi sosial dan ekonomi secara makro.

Berpengaruhnya masalah kemiskinan terhadap pembangunan menjadikan masalah kemiskinan ini sering dikaitkan dengan masalah-masalah nasional lainnya. Tidak heran jika penurunan angka kemiskinan ini menjadi salah satu prioritas pembangunan, tidak hanya di Indonesia, akan tetapi di berbagai negara lain pun demikian. Dalam kesepakatan dunia internasional, pengentasan kemiskinan ini menjadi tujuan pertama dalam SDGs. Hal ini menjadi bentuk kepedulian dunia internasional terhadap masalah kemiskinan.

Kemiskinan memiliki banyak sudut pandang. Konsep kemiskinan yang digunakan BPS mengacu pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Perkembangan Penduduk Miskin

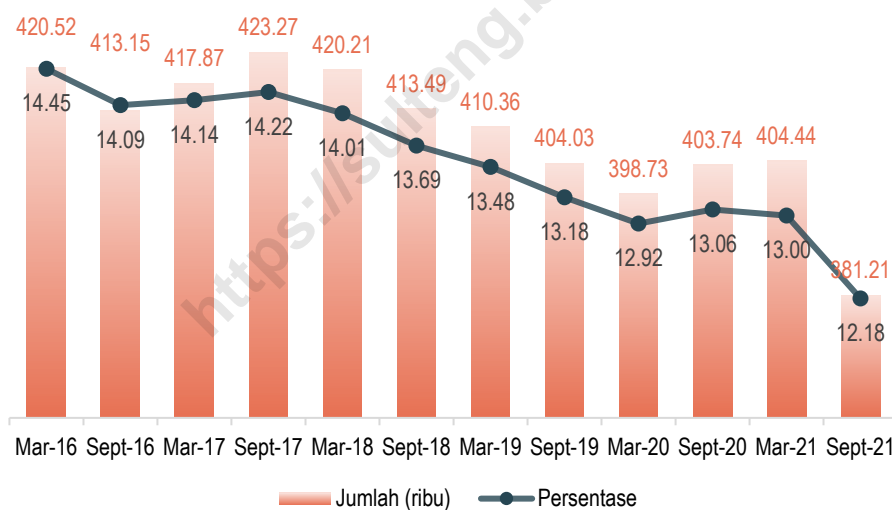
Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang lain seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Indikator kemiskinan ini sangat identik dengan pendapatan penduduk. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian,



jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Pemerintah selaku perancang dan pengambil kebijakan terus berupaya merumuskan paket-paket kebijakan terkait pengentasan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Pengentasan masalah kemiskinan ini memang tidak mudah. Kemiskinan ini seperti lingkaran yang membelenggu di mana kemiskinan ini bisa menjadi sebab sekaligus menjadi akibat dari rendahnya kualitas kehidupan manusia. Kompleksnya masalah kemiskinan ini, menjadikan masalah ini tidak mudah untuk dituntaskan.

Gambar 7.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah, 2016 – 2021



Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2021

Pengentasan kemiskinan ini sesungguhnya telah diupayakan oleh pemerintah dengan berbagai macam program yang telah direncanakan baik di level nasional maupun daerah. Selama periode 2016 – 2021, persentase kemiskinan di Sulawesi Tengah telah menurun dari 14,09 persen menjadi 12,18 persen (periode September).



Tabel 7.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Tengah, 2016 – 2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016 (Mar)	75,45	345,07	420,52	10,18	15,91	14,45
2016 (sept)	75,90	337,25	413,15	10,07	15,48	14,09
2017 (Mar)	77,98	339,88	417,87	10,16	15,54	14,14
2017 (sept)	81,56	341,72	423,27	10,39	15,59	14,22
2018 (Mar)	85,03	335,18	420,21	10,15	15,51	14,01
2018 (sept)	83,84	329,65	413,49	9,50	15,41	13,69
2019 (Mar)	84,74	325,62	410,36	9,32	15,26	13,48
2019 (sept)	81,46	322,57	404,03	8,90	15,01	13,18
2020 (Mar)	80,73	318,00	398,73	8,76	14,69	12,92
2020 (sept)	87,43	316,31	403,74	9,21	14,76	13,06
2021 (Mar)	88,31	316,14	404,44	9,15	14,73	13,00
2021 (sept)	86,67	294,54	381,21	8,82	13,71	12,18

Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022

Masalah kemiskinan yang sangat multidimensi ini memang erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi dan lebih banyak ditemukan di daerah pedesaan. Dari sisi jumlah, penduduk miskin di daerah pedesaan jauh lebih banyak dibandingkan dengan daerah perkotaan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin (periode September) di pedesaan sebanyak 294,54 ribu jiwa, lebih dari tiga kali lipat dari jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan yang sebesar 86,67 ribu jiwa (periode September). Tidak hanya dari segi jumlah, dari angka persentase pun menunjukkan kondisi yang sama, yakni persentase penduduk miskin di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Sulawesi Tengah masih terpusat di daerah pedesaan. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Tengah, tetapi pola yang sama juga terjadi di Indonesia secara umum.

Jika diperhatikan perkembangannya, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan ini memiliki tren fluktuatif. Secara umum, penurunan angka kemiskinan mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan maupun perkotaan. Pengentasan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan ini harus terus diupayakan semaksimal mungkin mengingat bahwa perkembangan



penduduk miskin di Sulawesi Tengah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduk miskin di pedesaan, karena jumlahnya yang sangat dominan.

Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan di Perdesaan Lebih Tinggi

Pembahasan kemiskinan tidak hanya seputar jumlah, persentase, dan perkembangannya. Indikator yang juga perlu diperhatikan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Selanjutnya, Indeks Kearifan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 7.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Tengah, 2016 – 2021

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)			Indeks Kearifan Kemiskinan (P ₂)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016 (Mar)	1,89	3,01	2,72	0,53	0,79	0,73
2016 (sept)	1,93	2,40	2,28	0,56	0,56	0,56
2017 (Mar)	2,05	2,73	2,55	0,62	0,75	0,72
2017 (sept)	1,85	3,14	2,80	0,46	0,90	0,78
2018 (Mar)	2,02	2,88	2,64	0,57	0,80	0,74
2018 (sept)	1,30	2,68	2,28	0,42	0,78	0,68
2019 (Mar)	1,43	2,71	2,33	0,32	0,76	0,63
2019 (sept)	1,98	3,71	3,19	0,54	1,41	1,15
2020 (Mar)	1,68	2,96	2,58	0,43	0,92	0,77
2020 (sept)	1,83	3,20	2,78	0,43	1,07	0,87
2021 (Mar)	1,55	2,82	2,43	0,41	0,75	0,64
2021 (sept)	1,48	2,59	2,24	0,43	0,70	0,62

Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2022

Berdasarkan nilai P1 dan P2 di Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2016–2021, tidak tampak adanya penurunan angka yang signifikan. Dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, selain jumlah dan



persentase penduduk miskin yang lebih tinggi, ternyata tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah perdesaan secara umum juga lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Artinya, tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih dalam dan ketimpangan antar penduduk miskin pun lebih tinggi. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa masalah kemiskinan di daerah perdesaan memang lebih kompleks dibandingkan daerah perkotaan.

<https://sulteng.bps.go.id>



Indikator Sosial Lainnya

<https://saling.bps.go.id>



INDIKATOR SOSIAL LAINNYA

Perkembangan zaman di era globalisasi saat ini tampak merubah banyak hal dalam tatanan kehidupan masyarakat. Masyarakat dituntut untuk dapat beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Perubahan mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari kondisi sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya.

Seiring dengan perubahan yang terjadi, tingkat kebutuhan manusia mulai mengalami pergeseran, dari yang sebelumnya merupakan kebutuhan sekunder atau tersier, kini telah berubah menjadi kebutuhan primer. Contoh sederhana seperti kebutuhan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, berlibur atau berwisata, bahkan eksistensi di tengah masyarakat pun kini menjadi kebutuhan. Hal-hal tersebut tidak lagi terpisahkan dalam kehidupan masyarakat secara umum sehingga menjadi wajar apabila indikator sosial semacam itu kini menjadi salah satu pengukuran perkembangan kesejahteraan masyarakat.

Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Menjadi Kebutuhan Primer

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini berkembang begitu pesat. Perkembangan ini menjadi salah satu pendorong arus globalisasi. Di era TIK yang semakin canggih dan mudah diakses, jarak tidak lagi menjadi faktor dalam hubungan antar individu maupun antar lembaga atau usaha. Ketersediaan infrastruktur dan kemudahan akses terhadap TIK ini akan mempengaruhi pergerakan manusia dalam berbagai urusan, baik itu urusan antar individu, urusan pemerintahan, bisnis, politik, serta urusan yang lainnya. Secara otomatis, akses terhadap TIK ini menjadi salah satu faktor pendorong kemajuan suatu daerah.

Salah satu tantangan pembangunan negara yang luas seperti Indonesia ini yaitu penyediaan layanan infrastruktur yang merata untuk memudahkan konektivitas antara daerah yang satu dengan daerah yang lain secara cepat. Layanan infrastruktur yang dibutuhkan ini tidak hanya tentang pembangunan secara fisik seperti jalan dan transportasi, akan



tetapi infrastruktur pendukung akses terhadap TIK juga sangat penting untuk diprioritaskan.

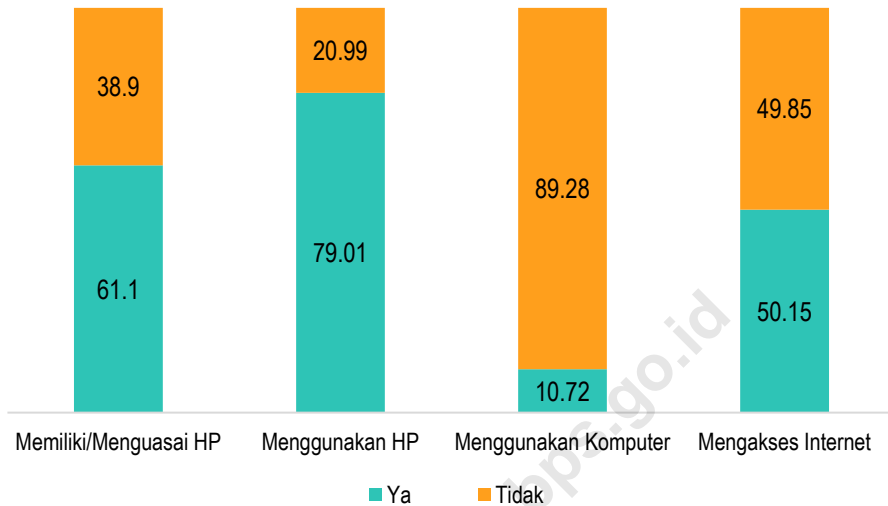
Kemajuan TIK ini memberikan manfaat yang sangat positif bagi masyarakat. Jika ini dapat dikembangkan dengan optimal, akan dapat mendongkrak kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan TIK, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses TIK, diharapkan kehidupan akan terus bergerak, sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Pada era tahun 1990an, kepemilikan alat TIK seperti telepon genggam atau *handphone* (HP) dan komputer hanya terbatas pada kalangan ekonomi kelas atas. Di sebagian besar masyarakat, TIK ini sebagai barang mewah yang tidak dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, kini kebutuhan akan TIK sudah menjadi kebutuhan primer dan bahkan telepon genggam menjadi bagian dari gaya hidup semua kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin terjangkaunya harga telepon genggam dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet. Masyarakat semakin mudah mengakses segala informasi yang diinginkan.

Pada tahun 2021, persentase penduduk berumur lima tahun ke atas yang memiliki/menguasai telepon genggam sebanyak 61,10 persen. Hal ini menunjukkan sudah lebih dari setengah penduduk berumur lima tahun ke atas telah memiliki akses telepon genggam. Sementara yang telah menggunakan telepon genggam telah mencapai 79,01 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang sebesar 77,41 persen.



Gambar 8.1. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Beberapa Akses Terhadap TIK di Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021

Berbeda dengan telepon seluler, penggunaan perangkat komputer menunjukkan angka yang masih rendah. Persentase penduduk yang mengakses komputer di Sulawesi Tengah pada tahun 2021 sebesar 10,72 persen. Angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 13,06 persen. Masih rendahnya persentase penduduk penggunaan komputer ini dikarenakan tidak semua lapisan masyarakat membutuhkan komputer, hanya pada pekerjaan dan urusan tertentu saja yang memanfaatkan komputer. Sementara untuk telepon seluler lebih banyak dibutuhkan hampir di semua lapisan masyarakat. Selain itu, penggunaan telepon seluler juga lebih mudah dioperasikan, lebih terjangkau, mobilitasnya juga lebih mudah, dan sebagian besar hanya digunakan untuk komunikasi, sedangkan komputer lebih kompleks.

Seiring perkembangan arus informasi yang bergerak cepat di mana sebagian masyarakat membutuhkannya untuk menunjang aktivitas sehari-hari, baik untuk kebutuhan pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, maupun hiburan, penggunaan telepon seluler ini sangat diminati masyarakat. Hal ini mengundang para produsen telepon seluler untuk berlomba-lomba menguasai pasar.

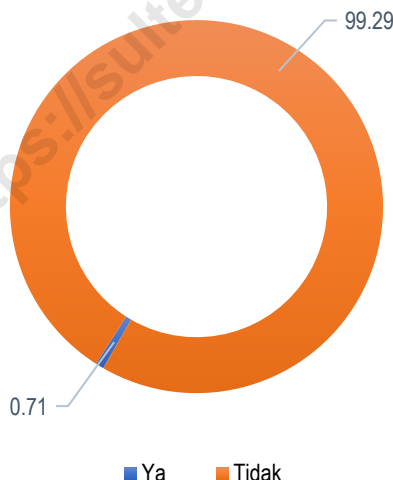


Tindak Kejahatan Masih Perlu Diwaspadai

Rasa aman dari tindak kejahatan menjadi salah satu indikator pendukung yang mencerminkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tidak hanya dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari, akan tetapi rasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas juga harus terpenuhi. Dalam penyusunan Indeks Kebahagiaan Indonesia oleh BPS, rasa aman ini juga menjadi salah satu aspek penyusunnya.

Tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan (BPS). Tindak kejahatan ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, salah satunya akibat kesenjangan sosial dan ekonomi.

Gambar 8.2. Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021

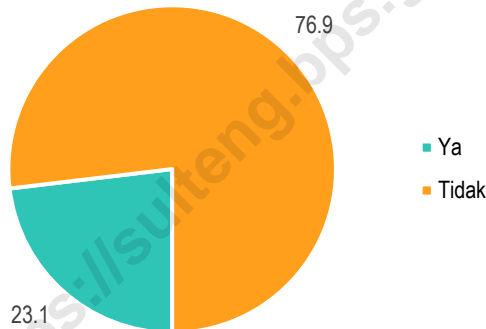
Pada tahun 2021 terdapat 0,71 persen penduduk yang menjadi korban kejahatan . Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 1,22 persen. Hal ini merupakan hasil kerja keras semua pihak khususnya yang berwajib dalam upaya menumpas segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Meskipun angka persentase menurun, akan tetapi masyarakat dihimbau agar tetap waspada.



Kredit Usaha Menggerakkan Ekonomi Masyarakat

Aliran dana kepada masyarakat berupa kredit usaha dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan. Pemberdayaan dalam bentuk pemberian kredit usaha ini akan mendukung peningkatan pendapatan, produktivitas, dan penyediaan lapangan kerja.

Gambar 8.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Penerimaan Kredit Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021

Di Sulawesi Tengah, pada tahun 2021 persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha sebesar 23,10 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 24,80 persen. Kredit Usaha yang dimaksud dapat berbentuk Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi. Kredit Modal Kerja dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dalam operasional bisnis, sedangkan Kredit Investasi lebih diarahkan untuk pengadaan barang modal jangka panjang. Kredit usaha dapat berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diberikan oleh beberapa bank terpilih dan bisa juga berupa PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), program bank selain KUR, KUBE/KUB, program koperasi, perorangan dengan bunga, dan lainnya.



DATA
MENCERDASKAN BANGSA

<http://sulteng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jl. Prof. Moh. Yamin, SH. No 48 Palu 94114
Telepon (0451) 483610, 483611, Fax (0451) 483612
Website: <http://sulteng.bps.go.id>; email: bps7200@bps.go.id

